TUGAS AKHIR – RA.141581

PENATAAN KAMPUNG MRICAN DENGAN METODE PARTISIPATIF

ADLI NIBRAS PRAMUDIA
08111440003041

Dosen Pembimbing
Wahyu Setyawan, S.T, M.T.

Departemen Arsitektur
Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2018

TUGAS AKHIR – RA.141581

PENATAAN KAMPUNG MRICAN DENGAN METODE PARTISIPATIF

ADLI NIBRAS PRAMUDIA
08111440003041

Dosen Pembimbing
Wahyu Setyawan, S.T., M.T.

Departemen Arsitektur
Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2018

LEMBAR PENGESAHAN

PENATAAN KAMPUNG MRICAN DENGAN METODE PARTISIPATIF

Disusun oleh :

ADLI NIBRAS PRAMUDIA
NRP : 08111440003041

Telah dipertahankan dan diterima
oleh Tim penguji Tugas Akhir RA.141581
Departemen Arsitektur FADP-ITS pada tanggal 6 Juli 2018
Nilai : A

Mengetahui

Pembimbing	Kaprodi Sarjana
Wahyu Setyawan, S.T,M.T	**Defry Agatha Ardianta, S.T, M.T**
NIP. 19721226 199702 1 001	**NIP. 19800825 200604 1 004**

Kepala Departemen Arsitektur FADP ITS

Ir. I Gusti Ngurah Antaryama, Ph.D.
NIP. 19680425 199210 1 001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

N a m a : Adli Nibras Pramudia

N R P : 08111440003041

Judul Tugas AKhir : Penataan Kampung Mrican dengan Metode Partisipatif

Periode : Semester Genap Tahun 2017/2018

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya buat adalah hasil karya saya sendiri dan benar-benar dikerjakan sendiri (asli/orisinil), bukan merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain. Apabila saya melakukan penjiplakan terhadap karya mahasiswa/orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh pihak Departemen Arsitektur FADP - ITS.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran yang penuh dan akan digunakan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Tugas Akhir RA.141581

Surabaya, 6 Juli 2018

Yang membuat pernyataan

Adli Nibras Pramudia

NRP. 08111440003041

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmatNya saya dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul "Penataan Kampung Mrican dengan Metode Partisipatif" dengan sebaik-baiknya.

Dalam menyelesaikan laporan ini, saya mendapat bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Defry Agatha Ardianta, S.T, M.T selaku dosen koordinator mata kuliah tugas akhir.
2. Angger Sukma Mahendra, S.T, M.T selaku dosen koordinator mata kuliah tugas akhir.
3. Wahyu Setyawan, S.T, M.T selaku dosen bembimbing mata kuliah tugas akhir yang telah membimbing dan memberikan saya banyak masukan selama penyusunan laporan ini.
4. Ir. Andy Mappajaya, M.T selaku dosen penguji sidang tugas akhir yang telah memberikan saya banyak masukan selama penyusunan laporan ini.
5. Ir. M. Dwi Hariadi, M.T selaku dosen penguji sidang tugas akhir yang telah memberikan saya banyak masukan selama penyusunan laporan ini.
6. Dr. Ir. V. Totok Noerwasito, M.T selaku dosen penguji sidang tugas akhir yang telah memberikan saya banyak masukan selama penyusunan laporan ini.
7. Semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Akhirnya laporan ini telah selesai dan semoga bermanfaat bagi kita semua dalam menyelesaikan permasalahan kampung.

Surabaya, Juli 2018

Penyusun

ABSTRAK

PENATAAN KAMPUNG MRICAN DENGAN METODE PARTISIPATIF

Oleh

Adli Nibras Pramudia

NRP : 08111440003041

Dewasa ini kebutuhan hidup semakin lama semakin bertambah dan beraneka ragam. Pada dasarnya manusia akan memenuhi kebutuhan paling dasarnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhannya dasar yang tingkatannya lebih tinggi. Banyak warga dari pinggiran provinsi DIY yang mencoba peruntungan untuk mengadu nasib ke kebupaten Sleman. Untuk dapat bertahan mereka kemudian membangun rumah pada daerah aliran sungai Gajahwong yang rawan terhadap bencana banjir. Tidak hanya itu ternyata tanah yang mereka tempati adalah tanah milik desa Caturtunggal, padukuhan Mrican, sehingga mereka harus membayar sejumlah uang tiap tahunnya sebagai kompensasi atas tanah yang mereka sewa.

Banyaknya warga pinggiran kota yang mengadu nasib ke kabupaten Sleman membuat permasalahan baru pada sekitar daerah aliran sungai Gajahwong. Mereka yang datang mulai mendirikan bangunan di sekitar daerah aliran sungai Gajahwong yang mempunyai fungsi sebagai daerah serapan air hujan.

Selain itu permasalahan berikutnya terkait dengan kurangnya interaksi sosial antar warga. Kurangnya interaksi sosial membuat kondisi mereka menjadi semakin sulit untuk dapat bermukim secara aman. Padahal kepedulian antar warga ialah hal yang sangat penting untuk terbebas dari ancaman keamanan bermukim tersebut.

Salah satu metode yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan warga Mrican adalah membangun bersama warga dengan metode partisipatif. Metode ini lebih menitikberatkan kepada partisipasi warga dengan tujuan dapat mempersiapkan diri mereka untuk nantinya berpindah ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Sehingga ketika pemerintah desa ingin menggunakan tanah yang mereka tinggali, warga telah siap untuk pergi.

Kata Kunci: Kebutuhan Dasar, Keamanan Bermukim, Metode Partisipatif

ABSTRACT

MRICAN KAMPUNG REMAINING WITH PARTICIPATORY METHOD

By

Adli Nibras Pramudia

NRP : 08111440003041

Nowadays the daily needs are becoming more complicated. Basically people will fulfill their basic need first. Therefore many countryside residents of Yogyakarta Special Regions (D.I. Yogyakarta) tried to get a better job in Sleman. Because of financial constraints, those nomads survive by building houses in Gajahwong riverbank area. But actually, it is a prone area to flood disaster. Furthermore, Gajahwong riverbank area is actually under the right of Caturtunggal village government and those who live there should pay compensation fee.

The new comers are so many until their existence affecting the river flows and causing problems. Their residential become a big obstacle as the water cannot flow smoothly.

Other problem in that residential is lack of social interaction makes their condition to dwell safety become more difficult. But actually, respect to each other is an important thing overcome their dwelling problems.

One method that can be done to overcome the problems of Mrican citizens is to build together citizens with participatory methods. This method focuses more on the participation of citizens with the goal of preparing themselves to move to a safer and more comfortable place. So when the village government wants to use the land they live in, the villagers are ready to leave.

Keywords: Basic Needs, Settlement Security, Participatory Methods

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN _____ i
LEMBAR PERNYATAAN _____ ii
KATA PENGANTAR _____ iii
ABSTRAK _____ iv
DAFTAR ISI _____ vi
DAFTAR GAMBAR _____ vii
DAFTAR TABEL _____ x
DAFTAR LAMPIRAN _____ xi
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang _____ 1
1.2 Isu dan Konteks Desain _____ 3
1.3 Permasalahan dan Kriteria Desain _____ 13
BAB 2 PROGRAM DESAIN
2.1 Rekapitulasi Program Ruang _____ 14
2.2 Deskripsi Tapak _____ 19
BAB 3 PENDEKATAN DAN METODA DESAIN
3.1 Pendekatan Desain _____ 22
3.2 Metoda Desain _____ 25
3.2 Kajian Teori Pendukung _____ 28
BAB 4 KONSEP DESAIN
4.1 Eksplorasi Formal _____ 31
4.2 Eksplorasi Teknis _____ 42
BAB 5 DESAIN
5.1 Eksplorasi Formal _____ 50
5.2 Eksplorasi Teknis _____ 73
BAB 6 KESIMPULAN _____ 85
DAFTAR PUSTAKA _____ 86
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pola Permukiman Tidak Tertata 1
Gambar 1.2 Diagram Gini Ratio Provinsi DIY tahun 2014-2017 3
Gambar 1.3 Penjabaran Isu 3
Gambar 1.4 Diagram Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 4
Gambar 1.5 Peta Lokasi Penataan Permukiman Kampung Mrican 9
Gambar 1.6 Permukiman Warga Mrican 4
Gambar 1.7 Kondisi Sempadan Sungai pada Perkampungan Mrican 11
Gambar 1.8 Ilustrasi Kriteria Desain Kampung Mrican 14
Gambar 2.1 Dasar Penentuan Program Aktivitas dan Fungsi Bangunan 14
Gambar 2.2 Aktivitas Eksisting Kampung Mrican 16
Gambar 2.3 Rencana Aktivitas Kampung Mrican 16
Gambar 2.4 Fungsi Kampung Mrican 17
Gambar 2.5 Zonasi Aktivitas Kampung Mrican 18
Gambar 2.6 Zonasi Aktivitas Produksi Kampung Mrican 19
Gambar 2.7 Zonasi Aktivitas Relaksasi Kampung Mrican 19
Gambar 2.8 Zonasi Aktivitas Bermukim Kampung Mrican 19
Gambar 2.9 Kondisi Eksisting Tanah Kampung Mrican 20
Gambar 2.10 Potongan Membujur Tapak 20
Gambar 2.11 Potongan Melintang Tapak dan Sungai 21
Gambar 3.1 Perbandingan Material Kolom 25
Gambar 3.2 Perbandingan Material Dinding 25
Gambar 3.3 Perbandingan Material Atap 26
Gambar 4.1 Penetapan Kriteria Rumah Terdampak 35
Gambar 4.2 Konsep Desain Terintegrasi 36
Gambar 4.3 Konsep Penataan Hunian Pinggir Sungai 36
Gambar 4.4 Konsep Munggah, Mundur Madep Kali 37
Gambar 4.5 Ilustrasi HBE Warga Mrican 37
Gambar 4.6 Konsep Penataan DAS Sungai Gajahwong 38
Gambar 4.7 Garis Sempadan Sungai sebagai Jalur Hijau 38

Gambar 4.8 DAS Gajahwong sebagai Sarana Rekreasi 39
Gambar 4.9 Konsep Penataan Fasilitas Umum Kampung 40
Gambar 4.10 Ilustrasi Wisata Edukasi Kampung Kampung 41
Gambar 4.11 Pemanfaatan Jalan Kampung sebagai Area *Urban Farming* 41
Gambar 4.12 Proses Pengolahan Sampah Organik menjadi Pupuk Cair 42
Gambar 4.13 Pemanfaatan Botol Bekas sebagai Pot Tanaman 42
Gambar 4.14 Contoh Hasil Kerajinan Tangan Warga Mrican 43
Gambar 4.15 Komposter Sampah Organik 43
Gambar 4.16 Blok Massa Sentra Kerajinan Tangan 44
Gambar 4.17 Blok Massa Bank Sampah 44
Gambar 4.18 Blok Massa Rumah Bapak Paimo 45
Gambar 4.19 Blok Massa Rumah Bapak Parji 46
Gambar 4.20 Blok Massa Rumah Bapak Priyanto 47
Gambar 4.21 Blok Massa Rumah Bapak Setu 47
Gambar 4.22 Blok Massa Rumah Bapak Muji 48
Gambar 4.23 Blok Massa Rumah Bapak Andhi 49
Gambar 4.24 Blok Massa Rumah Bapak Sugeng 49
Gambar 4.25 Blok Massa Rumah Bapak Arinta 50
Gambar 4.26 Blok Massa Rumah Bapak Hadi 51
Gambar 5.1 Site Plan 53
Gambar 5.2 Potongan Tapak dan Sungai 54
Gambar 5.3 Perspektif Mata Burung 55
Gambar 5.4 Perspektif Mata Normal 56
Gambar 5.5 Denah, Tampak, Potongan Rumah Bapak Paimo 57
Gambar 5.6 Denah, Tampak, Potongan Rumah Bapak Parji 58
Gambar 5.7 Denah, Tampak, Potongan Rumah Bapak Priyanto 59
Gambar 5.8 Denah, Tampak, Potongan Bank Sampah 60
Gambar 5.9 Denah, Tampak, Potongan Rumah Bapak Setu 61
Gambar 5.10 Denah, Tampak, Potongan Rumah Bapak Muji 62
Gambar 5.11 Denah, Tampak, Potongan Rumah Bapak Andhi 63
Gambar 5.12 Denah, Tampak, Potongan Rumah Bapak Sugeng 64
Gambar 5.13 Denah, Tampak, Potongan Rumah Bapak Arinta 65

Gambar 5.14 Denah, Tampak, Potongan Sentra Kerajinan _____66
Gambar 5.15 Denah, Tampak, Potongan Rumah Bapak Hadi _____67
Gambar 5.16 Sekuen Wisata Kampung _____68
Gambar 5.17 Sekuen Wisata Kampung _____69
Gambar 5.18 Sekuen Wisata Kampung _____70
Gambar 5.19 Sekuen Wisata Kampung _____71
Gambar 5.20 Sekuen Wisata Kampung _____72
Gambar 5.21 Sekuen Wisata Kampung _____73
Gambar 5.22 Sekuen Wisata Kampung _____74
Gambar 5.23 Sekuen Wisata Kampung _____75
Gambar 5.24 Struktur dan Material Rumah Warga _____76
Gambar 5.25 Struktur dan Material Bank Sampah_____77
Gambar 5.26 Struktur dan Material Sentra Kerajinan _____78
Gambar 5.27 Struktur dan Material Dermaga Rakit_____79
Gambar 5.28 Detail Pintu Lipat _____80
Gambar 5.29 Detail Dinding Anyaman Bambu _____81
Gambar 5.30 Detail Dinding Susunan Bata _____82
Gambar 5.30 Layout Utilitas _____83
Gambar 5.31 Proses Pengolahan Air Limbah _____84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Pendudukan Kebupaten Sleman 2015 _____2
Tabel 4.1 Proses Desain Partisipatif Warga Kampung Mrican_____33
Tabel 4.2 Jenis dan Kriteria Rumah Terdampak di Mrican _____34
Tabel 4.3 Kebutuhan dan Besaran Ruang Aktivitas Produksi _____44
Tabel 4.4 Kebutuhan dan Besaran Ruang Aktivitas Relaksasi _____45
Tabel 4.5 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Paimo _____45
Tabel 4.6 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Parji_____46
Tabel 4.7 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Priyanto_____46
Tabel 4.8 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Setu _____47
Tabel 4.9 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Muji_____48
Tabel 4.10 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Andhi_____48
Tabel 4.11 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Sugeng_____49
Tabel 4.12 Kebutuhan dan Besaran Ruang Hunian Bapak Arinta _____50
Tabel 4.13 Kebutuhan dan Besaran Ruang Hunian Bapak Hadi_____50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Keputusan Bupati Sleman Nomor 83/Kep.KDH/A/2014 tentang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan _____93

Lampiran 2 Surat Penagihan Sewa Tanah Kas Desa untuk Permukiman__103

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena permasalahan permukiman kumuh terjadi hampir di semua kota besar di Indonesia. Kabupaten Sleman sebagai salah satu wilayah yang diperhitungkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami permasalahan serupa. Permasalahan ini dimulai dengan kenaikan jumlah imigran yang sudah tidak bisa tertampung lagi di kota Yogyakarta sehingga memaksa imigran mencari daerah yang berdekatan dengan kota tersebut. Dikarenakan letak kabupaten Sleman yang berbatasan dengan kota Yogyakarta, maka jumlah penduduk di kabupaten Sleman seketika meningkat dengan pesat.

Ketika pertumbuhan jumlah penduduk tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi maka akan menimbulkan banyak permasalahan baru antara lain kekumuhan kota baru yang dibarengi dengan buruknya interaksi sosial. Kekumuhan baru diakibatkan dari lemahnya ekonomi warga imigran sehingga mereka belum bisa mendirikan hunian yang layak.

Gambar 1.1 Pola Permukiman Tidak Tertata
(Hasil Pengamatan, 2017)

Masalah tidak berhenti disitu saja tetapi ketika mereka bekerja dalam upaya pemenuhan kebutuhan, mereka juga menjadi kekurangan waktu untuk

berkumpul dan melakukan kegiatan bersama. Dampaknya mereka tidak saling memahami karakter antara satu warga dengan warga lainnya.

Data kependudukan kabupaten Sleman di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kecamatan Depok meningkat dengan pesat sehingga populasi penduduk per km^2 paling tinggi di kabupaten Sleman.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Pendudukan Kebupaten Sleman 2015

Kecamatan	Luas Wilayah	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Penduduk per km^2
1. Moyudan	27.62	30.719	1.112
2. Minggir	27.27	20.954	1.062
3. Seyegan	26.65	46.869	1.760
4. Godean	26.84	70.754	2.636
5. Gamping	29.25	106.330	3.635
6. Mlati	28.52	111.180	3.898
7. Depok	35.55	185.707	5.224
8. Berbah	22.99	56.831	2.472
9. Prambanan	41.35	48.419	1.171
10. Kalasan	35.84	84.150	2.348
11. Ngemplak	35.71	64.187	1.797
12. Ngaglik	38.52	115.321	2.994
13. Sleman	31.32	66.567	2.125
14. Tempel	32.49	50.628	1.558
15. Turi	43.09	34.189	793
16. Palem	43.84	37.430	854
17. Cangkringan	47.99	29.246	609
Jumlah/Total	574.82	1.167.481	2.031

Sumber: https://slemankab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/38, 2015

Sementara itu gini rasio di kabupaten Sleman cenderung tetap pada area perkotaan. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta gini rasio yang cenderung

tetap akan berdampak pada timbulnya kekumuhan-kekumuhan baru di kabupaten Sleman.

Gambar 1.2 Diagram Gini Ratio Provinsi DIY tahun 2014-2017
(Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, 2017)

1.2 Isu dan Konteks Desain

1.2.1 Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

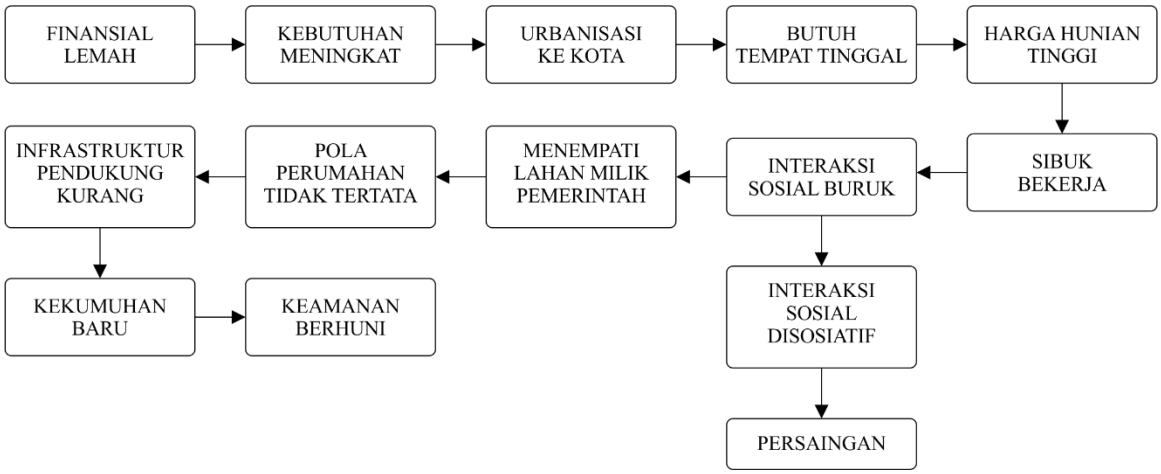

Gambar 1.3 Penjabaran Isu (Hasil Analisa)

Dewasa ini kebutuhan hidup semakin lama semakin bertambah dan beraneka ragam. Pada dasarnya manusia akan memenuhi kebutuhan paling dasarnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhannya dasar yang tingkatannya lebih tinggi. Maslow telah membentuk sebuah hirarki dari lima tingkat kebutuhan dasar. Di luar kebutuhan tersebut, kebutuhan tingkat yang lebih tinggi ada. Ini termasuk kebutuhan untuk memahami, apresiasi estetik dan spiritual kebutuhan murni. Dalam tingkat dari lima kebutuhan dasar, orang tidak merasa perlu kedua dan sebagainya. Menurut Maslow (Supratiknya 1987: 71-83) teori hierarki kebutuhan dasar manusia dapat dikembangkan untuk menjelaskan kebutuhan dasar manusia adalah sebagai berikut[1]

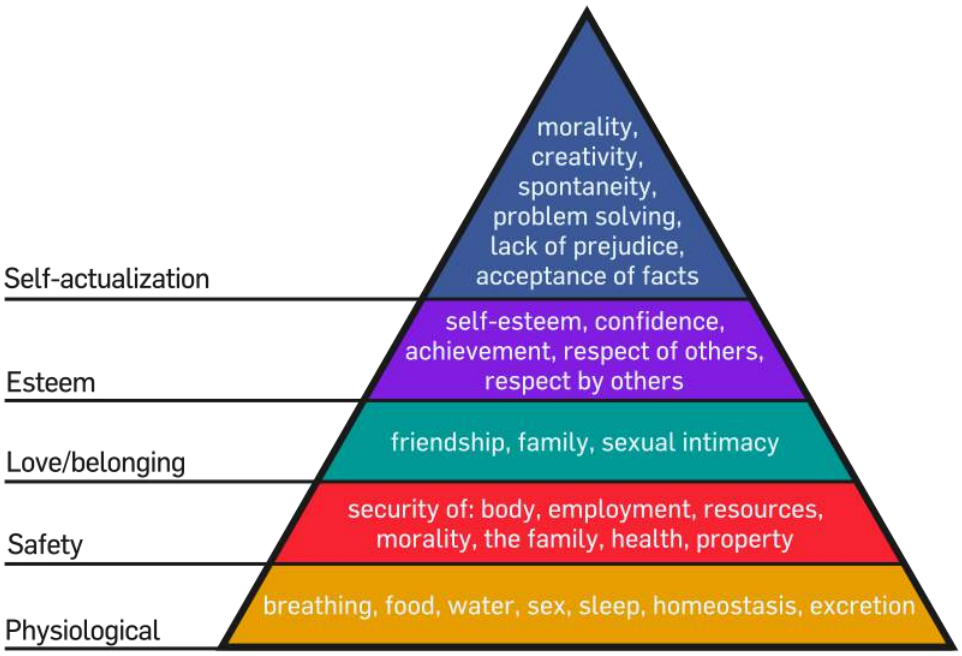

Gambar 1.4 Diagram Teori Hirarki Kebutuhan Maslow
(id.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow,2017)

Namun terkait isu permasalahan interaksi sosial ada beberapa kebutuhan dasar yang saling berhubungan. Kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan

[1] A. Supratiknya pada Teori Kebutuhan Dasar dalam G. Goble, Frank*: **Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow** (1987)*

fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur dan oksigen.

Lalu kebutuhan rasa aman adalah rasa aman, fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan dan bencana alam. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total. Manusia tidak pernah dapat dilindungi sepenuhnya dari ancaman-ancaman meteor, kebakaran, banjir atau perilaku berbahaya orang lain.

Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan rasa memiliki-dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Seseorang yang kebutuhan cintanya sudah relatif terpenuhi sejak kanak-kanak tidak akan merasa panik saat menolak cinta. Ia akan memiliki keyakinan besar bahwa dirinya akan diterima orang-orang yang memang penting bagi dirinya. Ketika ada orang lain menolak dirinya, ia tidak akan merasa hancur.

1.2.2 Permukiman Kumuh

Menurut UU No. 4 pasal 22 tahun 1992 permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya[2]. Menurut Doxiadis (1968) dalam perkembangannya pertumbuhan permukiman kumuh dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu[3] :

---

[2] UU No. 4 pasal 22 tahun 1992

[3] Doxiadis. Constantinos A pada ***Ekistics; an Introduction to The Science of Human Settlements*** *(1968)*

1) *Growth of density* (Pertambahan Penduduk)

Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.

2) *Urbanization* (Urbanisasi)

Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanisasi yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memiliki untuk tinggal di permukiman di sekitar pusat kota. Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota.

Ketika kita kaitkan faktor urbanisasi pada penyebab tumbuhnya permukiman kumuh di atas dengan pemenuhan kebutuhan, maka hal tersebut akan saling berkaitan. Pada dasarnya setelah manusia memenuhi kebutuhan fisiologisnya yang berkaitan dengan pemenuhan makanan dan minuman, maka manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan rasa aman yang dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan tempat tinggal. Permasalahannya adalah tidak setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa amannya tersebut, sehingga salah satu upaya yang mereka tempuh adalah berurbanisasi untuk mencoba merubah kehidupan mereka. Padahal pada kenyataannya banyak dari mereka yang belum bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Hal ini akan berdampak pada pemenuhan rasa aman yang masih belum maksimal sehingga banyak timbul kekumuhan-kekumuhan baru di kota.

1.2.3 Interaksi Sosial

Interaksi sosial menurut Henry Borne (1996) adalah proses dimana terciptanya aksi dan reaksi antar-manusia sebagai bentuk relasi sesama manusia[4].

[4] Henry Borne, John J. Macionis pada *Social Interaction in Everyday Life* : ***Sociology: A Global***

Proses ini menjadi penting karena pada dasarnya interaksi sosial adalah salah satu hal utama dalam kehidupan sosial. Melalui interaksi sosial, masyarakat kini dapat mengetahui dan mempelajari elemen-elemen budaya masyarakat lain, termasuk teknologi, seni, ilmu pengetahuan, dan lainnya.

Menurut Gillin (2007) terdapat 2 bentuk interaksi sosial, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif merupakan interaksi sosial yang memiliki nilai-nilai positif dan mendukung individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi ke dalam empat bentuk, yaitu[5]:

1. Kerjasama (*cooperation*), merupakan usaha yang dilakukan bersama baik antar-individu maupun antar-kelompok guna mencapai tujuan bersama juga.
2. Akomodasi (*accommodation*), merupakan suatu proses penyesuaian dalam interaksi sosial yang dilakukan oleh antar-individu maupun antar-kelompok guna meredakan konflik, pertentangan, atau hal negatif lainnya yang terjadi.
3. Asimilasi (*assimilation*), merupakan proses penyerapan dan peleburan kebudayaan satu kepada kebudayaan lainnya sehingga masing-masing pihak merasakan kebudayaan yang terlebur tersebut menjadi milik bersama.
4. Akulturasi (*acculturation*), merupakan proses penerimaan kebudayaan luar atau asing ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan unsur dan identitas asli kebudayaan sendiri menjadi hilang.

Interaksi sosial disasosiatif memiliki sifat yang berkebalikan dengan interaksi asosiatif, yang mana interaksi disosiatif lebih bersifat negatif. Interaksi disasosiatif dilakukan sebagai pertentangan akan kepentingan dan tujuan individu lain atau kelompok. Berikut adalah bentuk-bentuk dari interaksi sosial disasosiatif:

Introduction *(1996)*

[5] Gillin and Gillin dalam Elly M. Setiadi dkk : **Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar** (2007)

1. Persaingan (*competition*), merupakan interaksi sosial yang terjadi ketika masing-masing individu atau kelompok saling bersaing, berlomba, dan berkompetisi untuk mencari keuntungan sendiri.
2. Pertentangan (*social conflict*), merupakan proses sosial dimana individu atau kelompok menentang pihak lain karena adanya perbedaan tujuan dan kepentingan, baik dilakukan secara sadar atau tidak. Pertentangan menimbulkan *gap* atau jurang pemisah antara masing-masing pihak yang bertikai atau bertentangan.
3. Kontraversi (*controversion*), merupakan bentuk ketidaksenangan atau ketidakpuasan terhadap sesuatu yang dilakukan pihak lain, baik ditunjukkan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kontraversi merupakan bentuk interaksi sosial disasosiatif yang terjadi antara persaingan dan pertentangan.

Permasalahan interaksi sosial bisa timbul dikarenakan masyarakat yang berurbanisasi ke kota cenderung akan lebih sibuk bekerja dan mempunyai waktu yang sedikit untuk bersosialisasi. Sehingga sering terjadi gesekan satu sama lain dikarenakan kurang bisa saling memahami kepribadian masing-masing.

1.2.4 Lingkup Perancangan

Lingkup perancangan dalam tugas akhir ini adalah pada penataan kampung Mrican, kelurahan Caturtunggal, kecamatan Depok, kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapaun batas wilayah perancangan adalah pada 2 RT di padukuhan Mrican. Lahan tersebut dibatasi oleh permukiman warga yang tidak terdampak pada sisi barat, sungai Gajahwong pada sisi timur dan selatan, dan permukiman warga Mrican yang tidak termasuk pada rencana perancangan pada sisi utara lahan. Area lahan yang digunakan pada perancangan seluas ± (kurang-lebih) 0.5 hektar atau 5.000 m2.

Gambar 1.5 Peta Lokasi Penataan Permukiman Kampung Mrican
(https://earth.google.com, 2014)

1.2.5 Tinjauan Umum

Lokasi site berada pada padukuhan Mrican yang merupakan salah satu kawasan strategis karena letaknya berada di pusat kabupaten Sleman. Daerah Mrican berdekatan dengan berbagai perguruan tinggi ternama seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sanata Darma, dan lain sebagainya. Lokasi yang strategis tersebut memberikan potensi ekonomi yang besar. Sehingga dengan penataan yang baik diharapkan akan lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat Mrican.

Gambar 1.6 Permukiman Warga Mrican (Hasil Pengamatan, 2017)

Tetapi pada kenyataannya potensi yang besar tersebut belum dibarengi dengan lingkungan yang tertata dengan baik. Daerah Mrican masih menjadi salah satu daerah yang kumuh di kabupaten Sleman sesuai dengan SK bupati Sleman nomor 83/Kep.KDH/A/2014 (lihat pada lampiran 1) tentang kawasan permukiman kumuh perkotaan. Status Mrican yang masih sebagai daerah kumuh tersebut membuat pendapatan warganya dari sisi usaha kos-kosan dan fasilitas pendukung kos masih belum maksimal. Selain itu belum adanya inisiatif dari warga untuk bersatu juga menambah buruk keadaan untuk bisa meningkatkan ekonomi secara masif dan cepat disana.

1.2.6 Kajian Peraturan dan Data Pendukung

1.2.6.1 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 30

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi:

a. sempadan sungai;
b. kawasan sekitar mata air;
c. kawasan sekitar embung; dan
d. ruang terbuka hijau perkotaan.

(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
b. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;

Keadaan eksisting perkampungan mrican tidak sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten Sleman di atas. Pada perkampungan Mrican hunian masyarakat yang letaknya di pinggiran sungai telah melebihi batas dari garis sempadan sungai sebesar 3 m.

Gambar 1.7 Kondisi Sempadan Sungai pada Perkampungan Mrican
(Hasil Pengamatan, 2017)

1.2.6.2 Keputusan Bupati Sleman Nomor 83/Kep.KDH/A/2014 tentang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

Menurut Keputusan Bupati Sleman Nomor 83/Kep.KDH/A/2014 tentang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (lihat pada lampiran 1) bahwa kawasan

perkampunga Mrican termasuk ke dalam salah satu kawasan kumuh yang ada di kabupaten Sleman dengan tingkat kekumuhan sedang. Namun jika kekumuhan tidak segera teratasi maka akan timbul kekumuhan-kekumuhan baru lagi.

1.2.6.3 Perdes No: 04/Perdes/2015 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal

Menurut Perdes No: 04/Perdes/2015 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal, tanah kas desa adalah kekayaan desa dan merupakan bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Besaran dari pembayaran tagihan pemanfaatan tanah kas desa didasarkan pada luas persil tanah dan juga kelas dari tanah tersebut (lihat pada lampiran 2). Masyarakat Mrican selama ini tinggal di atas tanah kas desa Caturtunggal. Sehingga mereka hanya mempunyai hak atas bangunan saja di perkampungan tersebut.

1.2.7 Karakteristik Penghuni Kampung

Penghuni kampung pada kawasan ini adalah warga imigran dari daerah pinggiran provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Wonosari, Bantul serta kota-kota di sekitar Yogyakarta seperti Klaten, Solo dan sebagainya. Sebagai kaum imigran tentu mereka mempunyai budayanya masing-masing yang dibawa menuju tempat tinggal baru.

Salah satu budaya daerah Jawa Tengah dan sekitarnya yang kurang bagus adalah sering memendam masalahnya dengan orang lain tanpa terus terang terhadap orang yang bersangkutan. Budaya seperti ini yang akhirnya membuat warga Mrican terkadang memiliki konflik batin. Selain itu belum adanya tujuan bersama untuk mengatasi masalah keamanan bermukim juga melatarbelakangi kurang baiknya interaksi sosial di kampung Mrican.

Pendidikan dari warga Mrican yang tidak terlalu tinggi juga membuat pola pikir mereka menjadi sederhana. Mereka cenderung akan berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melihat apakah ketika warga bersatu akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Kurangnya inisiatif dari warga membuat mereka terancam dalam kaitannya dengan isu keamanan bermukim.

1.3 Permasalahan dan Kriteria Desain

1.3.1 Permasalahan Desain

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, permasalahan yang akan diangkat dalam tugas akhir ini adalah bagaimana menata kampung Mrican dengan metode partisipatif untuk menjawab masalah kekumuhan dan keamanan bermukim.

Berkaca pada masalah kekumuhan yang ada di padukuhan Mrican, maka salah satu masalah utamanya adalah masih terdapat cukup banyak rumah yang persil lahannya melewati garis sempadan sungai sebesar 3 m sesuai peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Sleman tahun 2011-2031 bab iv bagian rencana pola ruang wilayah kabupaten tentang kawasan perlindungan setempat pasal 30 ayat 2 poin b.

Permasalahan selanjutnya terkait dengan permasalahan interkasi sosial disosiatif. Dalam hal ini permasalahan interaksi sosial disosiatif warga Mrican berkaitan dengan persaingan. Permasalahan persaingan ini terindikasi dari belum terbentuknya kesadaran warga untuk bersatu guna mendapatkan perlindungan dari ancaman keamanan bermukim dan pada akhirnya nanti dapat pindah ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Warga cenderung merasa aman dan baik-baik saja padahal bisa saja mereka harus pindah dalam waktu dekat jika pemerintah desa ingin menggunakan tanahnya yang ada disana. Selain itu pada dasarnya bermukim pada daerah aliran sungai memiliki potensi ancaman bahaya yang besar.

1.3.2 Kriteria Desain

Berdasarkan permasalahan desain di atas makan kriteria desain yang sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut adalah:

1. Desain harus sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2002 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Sleman
2. Menjadi perkampungan yang produktif dan mandiri
3. Menjadi perkampungan yang terdesain dengan memperhatikan fungsi dan estetika
4. Desain hunian sesuai dengan kebutuhan warga secara spesifik

Gambar 1.8 Ilustrasi Kriteria Desain Kampung Mrican
(Hasil Analisa, 2018)

Diharapkan dengan terbentuknya kriteria desain yang komprehensif dapat menghasilkan desain penataan kampung yang sesuai sekaligus mengakomodir kebutuhan warga Mrican.

BAB 2
PROGRAM DESAIN

2.1 Rekapitulasi Program Desain

2.1.1 Dasar Penentuan Program Aktivitas dan Fungsi Bangunan

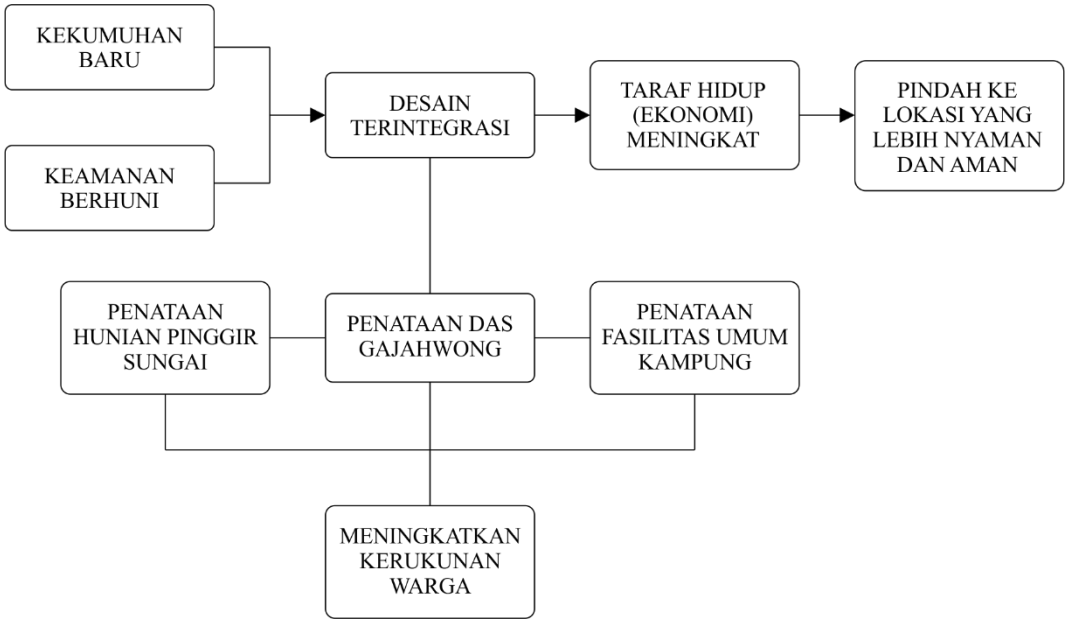

Gambar 2.1 Dasar Penentuan Program Aktivitas dan Fungsi Bangunan
(Hasil Analisis, 2017)

Berdasarkan pada diagram di atas maka masalah kekumuhan dan masalah keamanan berhuni menjadi permasalahan utama yang perlu direspon secara arsitektural. Untuk itu maka dibutuhkan desain terintegrasi yang dapat mewadahi aktivitas warga Mrican guna meningkatkan taraf hidup pada bidang ekonomi. Selain itu desain terintegrasi juga diharapkan dapat meningkatkan kerukunan antar warga karena mereka mempunyai keterikatan yang kuat dengan adanya tujuan bersama. Diharapkan dengan meningkatnya ekonomi warga maka pada saatnya nanti mereka dapat mencari tempat yang lebih layak dan aman untuk berhuni.

2.1.2 Program Aktivitas Kampung Mrican

Aktivitas warga yang ada di pinggir sungai Gajahwong saat ini hanya bermukim. Selain itu selama ini warga Mrican juga belum menggali potensi sungai Gajahwong secara maksimal.

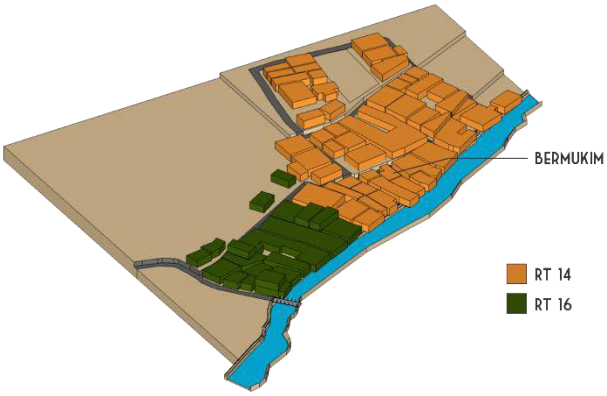

Gambar 2.2 Aktivitas Eksisting Kampung Mrican
(Hasil Analisis, 2017)

Pada rencana desain akan ditambahkan aktivitas baru yaitu aktivitas berdagang pada hunian warga pinggir sungai. Hal tersebut berguna untuk mendukung aktivitas baru lainnya pada DAS Gajahwong berupa aktivitas memancing dan berdagang. Selain itu aktivitas *urban farming*, produksi kerajinan tangan serta mendampingi wisatawan merupakan aktivitas yang saling terkait demi terselenggaranya wisata kampung Mrican.

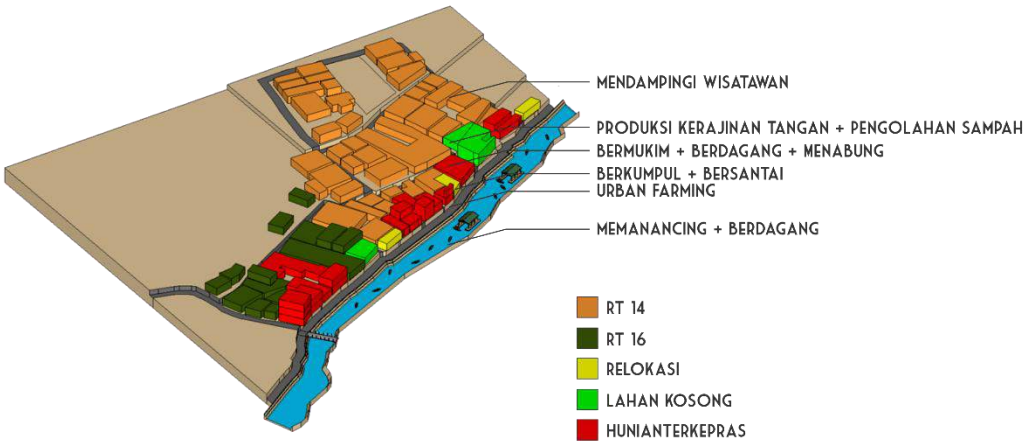

Gambar 2.3 Rencana Aktivitas Kampung Mrican (Hasil Analisis, 2017)

Sinergi antara aktivitas satu dan lainnya pada kampung Mrican diharapkan membantu mengurai permasalahan interaksi sosial yang selama ini ada. Warga yang dalam hal ini mempunyai tujuan yang sama untuk dapat berpindah ke tempat yang lebih layak dan lebih aman akan memulai untuk saling memahami, saling

mengerti, dan saling membantu satu sama lainnya. Sehingga keterikatan antar warga yang kuat akan mengikis permasalahan interaksi sosial diantara mereka.

Salah satu aktivitas penting yang ada di kampung Mrican lainnya adalah aktivitas menabung dua ribu setiap hari. Aktivitas menabung ini bertujuan untuk menjadi salah satu metode yang menyiapkan pendanaan mereka guna pindah ke tempat yang lebih layak dan aman.

4.1.3 Fungsi Kampung Mrican

Fungsi kampung Mrican akan diubah dari yang sebelummya hanya pemukiman penduduk biasa menjadi kampung wisata. Terdapat dua alternatif wisata edukasi pada kampung Mrican, yaitu wisata jelajah kampung dan wisata sungai Gajahwong. Sebagai wisata edukasi kampung, salah satu hal yang ingin dibagikan kepada para wisatawan adalah bagaimana kampung Mrican bertransformasi dari kampung biasa menjadi kampung yang produktif dan perwawasan lingkungan

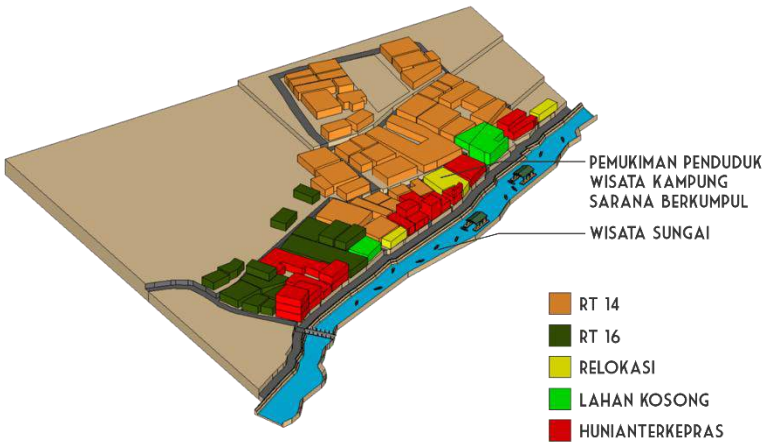

Gambar 2.4 Fungsi Kampung Mrican (Hasil Analisis, 2017)

Warga kampung Mrican diharapkan sudah tidak lagi terlalu bergantung kepada pemerintah sebagai penjamin keamanan bermukim mereka. Warga kampung diharapkan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keamanan bermukim yang selama ini belum mereka rasakan dengan berbagai cara seperti menabung, *urban farming* dengan memanfaatkan jalan kampung dan sebagian dinding rumah mereka, membuat kerajinan tangan dan aktivitas produktif lainnya. Banyaknya pundi-pundi pendapatan yang mereka dapatkan nantinya akan

digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan lahan yang lebih layak dan aman untuk mereka tinggali nantinya.

Semakin seringnya warga berinteraksi dalam usaha mereka mencapai tujuan bersama, maka mereka membutuhkan wadah untuk berkumpul membahas rencana-rencana strategis pengembangan kampung. Sehingga mereka bisa saja saling bergantian menggunakan rumah warga agar keterikatan mereka semakin kuat. Tetapi ketika mereka telah sampai pada rasa penat, maka mereka membutuhkan fungsi penyegaran dalam kampung mereka berupa taman. Minimnya lahan kosong membuat mereka selama ini tidak mempunyai tempat untuk menyegarkan jiwa mereka.

4.1.4 Dasar Penentuan Kebutuhan Jumlah dan Besaran Ruang

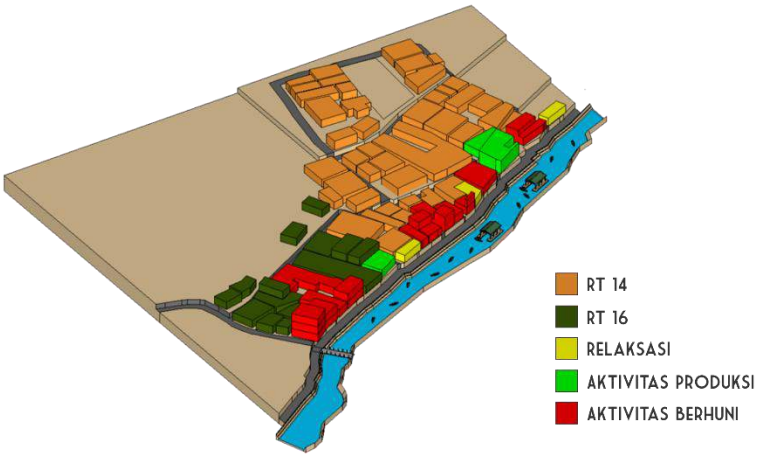

Gambar 2.5 Zonasi Aktivitas Kampung Mrican (Hasil Analisis, 2017)

Pada dasarnya kebutuhan jumlah dan besaran ruang harus bisa mewadahi aktivitas apa yang ada pada kampung Mrican. Aktivitas tersebut terkait dengan aktivitas berhuni, aktivitas produksi serta relaksasi. Aktivitas berhuni diantaranya adalah memasak, bertemu tamu, bertemu anggota keluarga, dan sebagainya. Aktivitas produksi diantaranya adalah mengolah sampah, memproduksi kerajinan tangan, *urban farming*, menabung, dan sebagainya. Sedangkan relaksasi mencakup aktivitas bagaimana warga kampung Mrican dapat melepas penat.

4.1.5 Kebutuhan Jumlah dan Besaran Ruang

4.1.5.1 Produksi

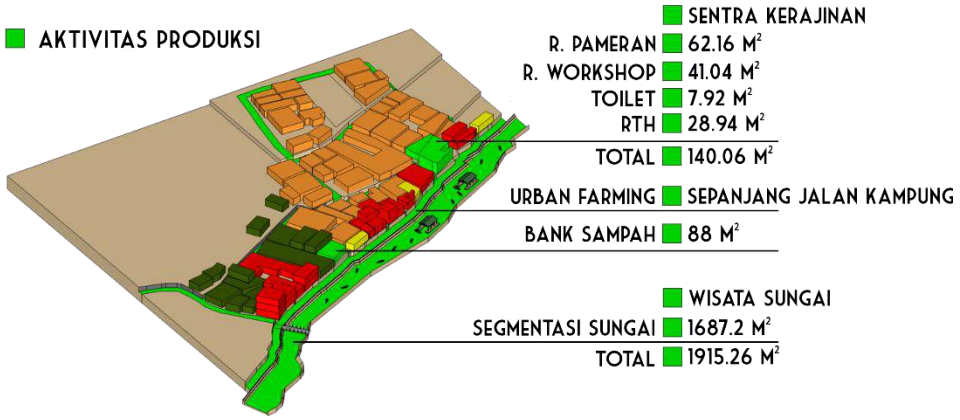

Gambar 2.6 Zonasi Aktivitas Produksi Kampung Mrican (Hasil Analisis, 2017)

4.1.5.2 Relaksasi

Gambar 2.7 Zonasi Aktivitas Relaksasi Kampung Mrican (Hasil Analisis, 2017)

4.1.5.2 Bermukim

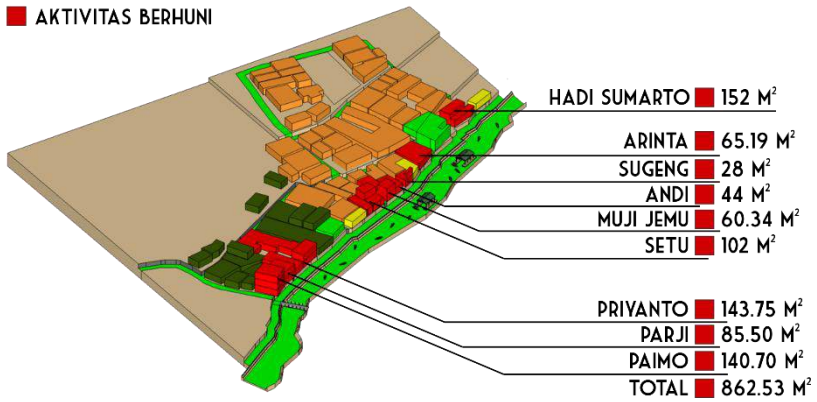

Gambar 2.8 Zonasi Aktivitas Bermukim Kampung Mrican (Hasil Analisis, 2017)

2.2 Deskripsi Tapak

2.2.1 Karakteristik Kawasan

Wilayah perancangan pada padukuhan Mrican memiliki status tanah kas desa (lihat pada lampiran 2). Warga Mrican setiap tahunnya akan membayar pajak pemanfaatan lahan ke pemerintah desa Caturtunggal.

Karakteristik tanah di Mrican tidak rata, ada bagian yang lebih tinggi dan lebih rendah. Sehingga terkadang ada jalan kecil pada perbedaan tinggi tanah. Terdapat tangga-tangga juga sebagai jalan kampung yang menghubungkan ketinggian tanah yang lebih rendah ke ketinggian tanah yang lebih tinggi.

Gambar 2.9 Kondisi Eksisting Tanah Kampung Mrican
(Hasil Pengamatan, 2017)

Keadaan tanah sungai Gajahwong juga tidak berbeda jauh dengan keadaan tanah pada kampung Mrican. Sungai Gajahwong memiliki kontur tanah yang arahnya berlawanan dengan kontur tanah kampung Mrican. Debit air minimal sungai mencapai 0.2 m^3/s dengan ketinggian muka air ± 1 m. Sedangkan debit maksimal sungai mencapai 1.8 m^3/s dengan ketinggian muka air ± 2.4 m.

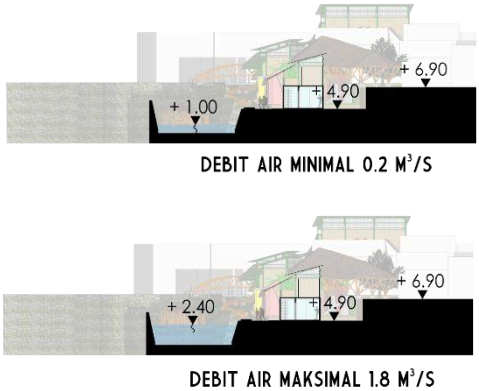

Gambar 2.10 Potongan Membujur Tapak
(Hasil Analisa, 2018)

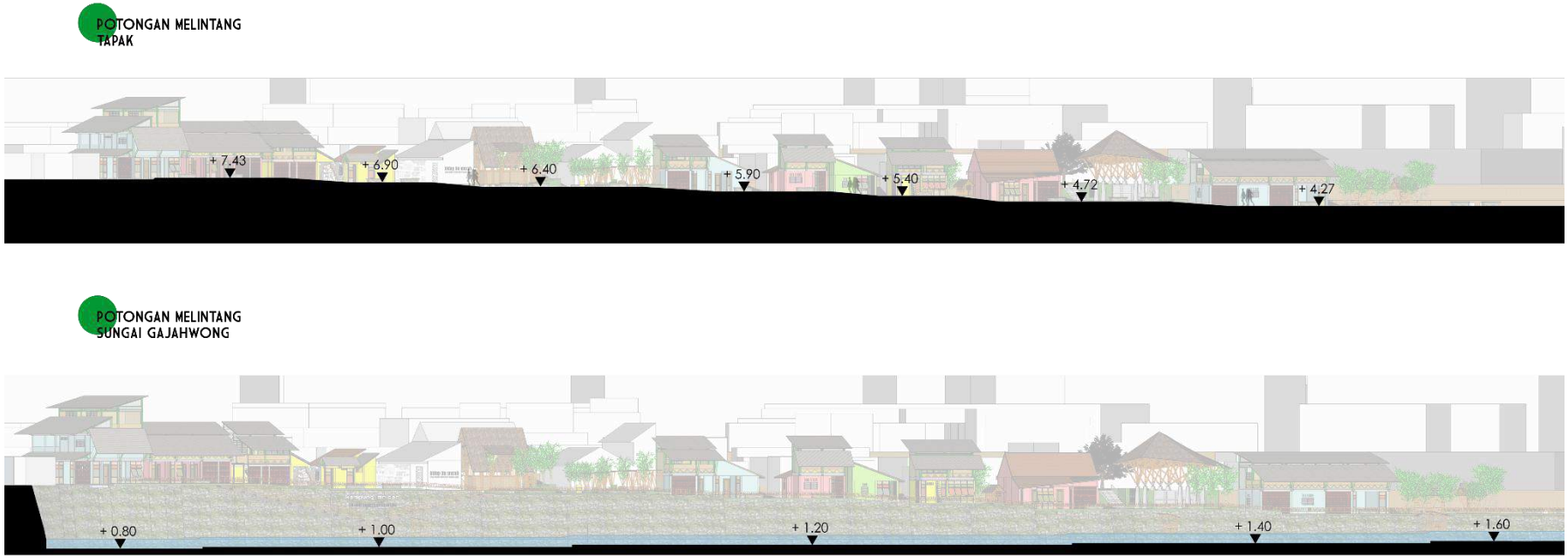

Gambar 2.11 Potongan Melintang Tapak dan Sungai (Hasil Analisa, 2018)

(halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 3
PENDEKATAN DAN METODE DESAIN

3.1 Pendekatan Desain

3.1.1 Pembangunan Sosial

3.1.1.1 Pengertian Pembangunan Sosial

Definisi pembangunan sosial menurut Midgley (2005:37) adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana dan didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis[6].

3.1.1.2 Sasaran Pembangunan Sosial

Todaro (M. P. Todaro, 1989:92), ada tiga sasaran yang seyogyanya dicapai dalam pembangunan sosial, yaitu[7]:

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok.
2. Meningkatkan taraf hidup, yaitu selain meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan juga perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang keseluruhannya akan memperbaiki bukan hanya kesejahteraan material tetapi juga menghasilkan rasa percaya diri sebagai individu ataupun sebagai suatu bangsa.
3. Memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan setiap bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan bukan hanya dalam hubungan dengan orang dan negara lain tetapi juga terhadap kebodohan dan kesengsaraan manusia. Pembangunan, dengan demikian, harus dipahami sebagai suatu proses

[6] Midgley, James pada ***Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*** (2005)

[7] Todaro, Michael. P, 1989. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga** (1989)

berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional.

3.1.1.3 Strategi Pembangunan Sosial

Dalam kaitannya dengan strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, Midgley (2005:149-201) mengemukakan ada tiga strategi besar, yaitu[8]:

1. Pembangunan sosial oleh individu, di mana kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat diangkat ketika para individu berusaha untuk mengangkat kesejahteraan mereka masing-masing. Pendekatannya lebih mengarah pada pendekatan individualis dan pendekatan *enterprise* (usaha).
2. Pembangunan sosial oleh masyarakat, di mana masyarakat saling bekerja sama secara harmonis serta memiliki tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan mereka, memecahkan permasalahan mereka dan berusaha menciptakan kesempatan guna memperbaiki hidup. Pendekatannya lebih dikenal dengan nama pendekatan kemasyarakatan.
3. Pembangunan sosial oleh pemerintah, di mana pembangunan sosial dilakukan oleh pemerintah, dengan agen-agennya yang khusus, pembuatan kebijakan, para perencana dan administraturnya. Negara mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan memiliki tanggung jawab mengangkat kesejahteraan seluruh warganegaranya. Pendekatannya lebih dikenal dengan nama pendekatan *statist* / negara.

3.1.2 Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi bertujuan agar dalam pemilihan bahan material bangunan warga akan mendapatkan bahan material yang murah dan mudah dibongkar-pasang.

---

[8] Midgley, James pada ***Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*** (2005)

Hal ini dilakukan sesuai dengan tujuan warga sebelumnya, yaitu berpindah ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Dengan begitu maka material yang dipilih harus memiliki masa pakai yang tidak terlalu lama.

3.1.2.1 Perbandingan Bahan Bangunan

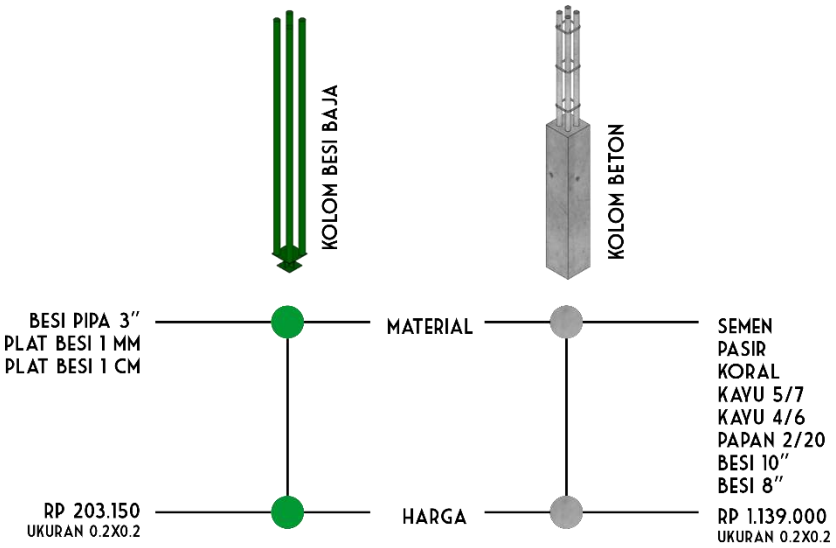

Gambar 3.1 Perbandingan Material Kolom (Hasil Analisa, 2018)

Dari perbandingan material kolom di atas dapat disimpulkan bahwa material kolom yang paling sesuai dengan kebutuhan warga Mrican adalah dengan menggunakan material besi pipa baja.

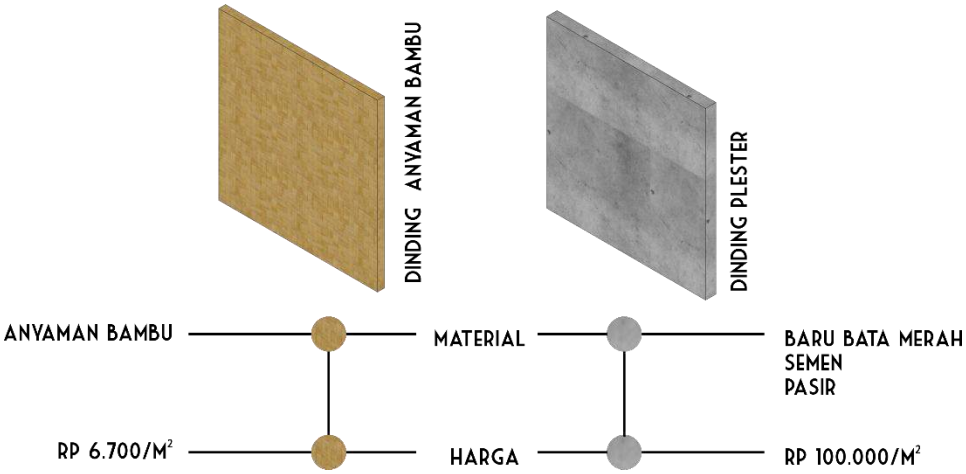

Gambar 3.2 Perbandingan Material Dinding (Hasil Analisa, 2018)

Sedangkan untuk perbandingan material dinding di atas dapat disimpulkan bahwa material dinding yang paling sesuai dengan kebutuhan warga Mrican adalah dengan menggunakan material anyaman bambu.

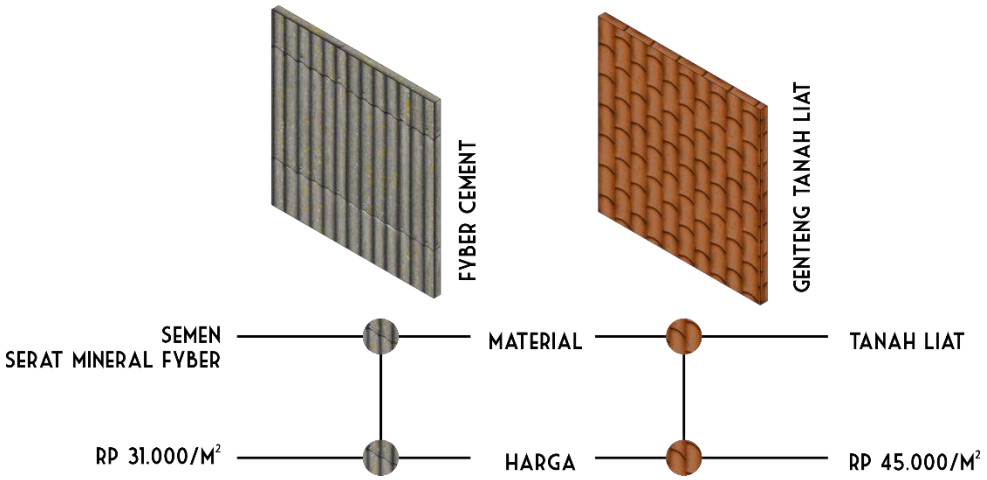

Gambar 3.3 Perbandingan Material Atap (Hasil Analisa, 2018)

Dan terakhir untuk perbandingan material atap di atas dapat disimpulkan bahwa material atap yang paling sesuai dengan kebutuhan warga Mrican adalah dengan menggunakan material *fyber cement*.

3.2 Metode Desain Partisipatif

3.2.1 Pengertian Partisipasi

Menurut Davis (2000:142) partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang/individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggungjawabkan keterlibatannya. Hal ini berarti partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggungjawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya[9].

[9] Keith, Davis, New Strom, John W pada **Perilaku dalam Organisasi Jilid 1** (2000)

Menurut Slamet (2003:8) partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan[10].

Menurut Mikkelsen (1999:64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu[11]:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

---

[10] Slamet pada ***Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*** (2003)

[11] Mikkelsen, Britha pada ***Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*** (1999)

3.2.2 Pendampingan Masyarakat

Dalam metode desain partisipasi seperti ini, masyarakat tidak dapat melakukannya sendiri. Diperlukan sinergi antara masyarakat dengan *stakeholder* terkait seperti pemerintah dan pihak lain untuk mendampingi masyarakat agar tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang artinya berujung pada kesejahteraan dibidang ekonomi dan sosial dapat tercapai.

Menurut Nasdian (2014) terdapat tiga pendekatan pendampingan masyarakat yaitu[12]:

2. Pendekatan menolong diri sendiri menitikberatkan pada peran masyarakat sebagai partisipan dalam melakukan kegiatan dan juga kontrol kegiatan, pendamping hanya sebatas fasilitator.
3. Pendekatan pendampingan teknik mendasarkan pada perkiraan kebutuhan oleh para perencana yang dapat mengantarkan dan mengevaluasi proses pengembangan masyarakat.
4. Pendekatan konflik menekankan pada upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa yang dilakukan oleh orang lain juga baik jika dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Nasdian (2014) membuat kriteria untuk pendampingan agar dapat dikatakan pendampingan partisipatif. Kriteria tersebut adalah[13]:

1. Mengandung unsur perencanaan, implementasi, dan evaluasi
2. Dapat dipandang sebagai alat yang berdiri sendiri dengan kekuatan dan kelemahannya
3. Merupakan alat yang bersifat partisipatif. Beberapa alat untuk melakukan pendampingan partisipatif kepada masyarakat diantaranya adalah *Technology of Participation (ToP), Encironmental Scanning (ES), Logical FrameApproach (LFA), Pariticipatory Impact Monitoring (PIM), Focus Group Discussion (FGD),* dan *Zielobjective Orientierte Project Planning (ZOPP)*

3.2.3 Tahapan Teknis Metode Partisipatif

[12] Nasdian, FredianTonny pada ***Pengembangan Masyarakat*** (2014)
[13] Nasdian, FredianTonny pada ***Pengembangan Masyarakat*** (2014)

Pada prinsipnya, seluruh perencanaan yang ideal melibatkan warga disusun melalui beberapa tahapan umum yaitu :

1. Pemetaan Pertisipatif (Community Mapping)

   Pemetaan partisipatif adalah media yang digunakan warga untuk mengenali kembali lingkungan sekitarnya secara menyeluruh. Warga menggambar ulang lingkungan sekitarnya dengan gambar dan alat yang sederhana menggunakan simbol-simbol yang mudah mereka pahami.

2. Analisis Peta Bersama

   Analisis peta adalah tahap identifikasi dan penghimpunan data mengenai masalah yang ada di suatu wilayah dari hasil pemetaan bersama. Data dasar yang diperoleh pada proses pemetaan kemudian didetailkan secara spasial yang dilengkapi dengan narasi deskriptif dan kuantitatif untuk menunjukkan titik / lokasi permasalahan secara akurat pada peta yang dibuat oleh warga.

3. Perencanaan Partisipatif (Community Planning)

   Perencanaan oleh komunitas adalah media bagi warga untuk merencanakan langkah atau kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik bagi kampung mereka.

4. Perancangan

   Pada tahapan ini, usulan/solusi yang ditemukan pada proses perencanaan kemudian didetailkan lebih spesifik bersama sama. Secara fisik, solusi didetailakan menjadi rancangan pra pembangunan (gambar awal dan spesifikasi material), sedangkan secara non fisik rancangan muncul dalam bentuk rencana aksi atau tahapan strategis.

3.3 Kajian Teori Pendukung

3.3.1 Pengertian Perubahan Sosial

Menurut Bruce J. Cohen (2009) perubahan sosial adalah perubahan struktur sosial dalam organisasi sosial sehingga syarat dalam perubahan itu adalah sistem sosial, perubahan hidup dalam nilai sosial dan budaya masyarakat[14].

[14] Cohen Bruce J pada ***Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*** (2009)

3.3.2 Bentuk Perubahan Sosial

M. Rogers (1995) mengemukakan 3 bentuk perubahan sosial, yaitu[15]:

1. *Immanen Change* yaitu suatu bentuk perubahan sosial yang berasal dari dalam sistem itu sendiri, yang sedikit atau tanpa inisiatif dari luar.
2. *Selective Contract Change* ialah suatu bentuk perubahan sosial yang terjadi apabila outsider (orang luar) secara tidak sengaja dan spontan membawa ide-ide baru kepada anggota dari suatu sistem sosial.
3. *Direct Contract Change* merupakan suatu bentuk perubahan sosial yang terjadi jika ide-ide atau cara-cara baru dibawa secara sengaja oleh outsider.

3.3.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sosial

Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial menurut Mooris Ginsberg (2003), yaitu[16]:

1. Faktor penyebab perubahan sosial yang pertama yaitu karena individu dalam masyarakat secara sadar mengadakan perubahan.
2. Faktor penyebab perubahan sosial yang kedua ialah karena sikap-sikap pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berubah. Perubahan-perubahan struktural dalam bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang politik.
3. Faktor penyebab perubahan sosial yang ketiga yaitu perubahan-perubahan struktural dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.
4. Faktor penyebab perubahan sosial yang keempat ialah karena pengaruh eksternal (dari luar).
5. Faktor penyebab perubahan sosial yang kelima yaitu karena munculnya pribadi-pribadi dan kelompok yang menonjol di dalam masyarakat (kelas menengah).
6. Faktor penyebab perubahan sosial yang berikutnya adalah muculnya peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya kekalahan dalam perang antara

[15] Rogers, Everett M pada ***Diffusions of Innovations, Forth Edition*** (1995)
[16] Ginsberg, Morris pada ***Keadilan dalam Masyarakat*** (2003)

negara yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan ekonomi dan politik di negara yang berperang tersebut.

7. Faktor penyebab perubahan sosial yang terakhir yaitu tercapainya konsensus di dalam masyarakat untuk meraih suatu tujuan bersama.

3.3.4 Ciri-ciri Perubahan Sosial

John J. Macionis (1987) menyebutkan adanya ciri-ciri perubahan sosial, yaitu sebagai berikut[17]:

1. Perubahan sosial terjadi di setiap masyarakat, kendatipun laju perubahan sosial bervariasi. Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bersahaja (*hunting and gathering societies*) lebih lambat dibandingkan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maju atau berteknologi tinggi. Dalam kehidupan masyarakat yang sama juga terjadi perbedaan perubahan elemen kebudayaan.
2. Perubahan sosial kerapkali berkembang pada arah yang sulit dikontrol. Sebuah penemuan atau kebijakan baru yang disusun untuk meningkatkan kesejahteraan sosial boleh jadi justru membuat masyarakat sengsara akibat dari manipulasi dan monopoli yang dilakukan oleh kelompok tertentu (penguasa dan pengusaha).
3. Perubahan sosial seringkali melahirkan kontroversi, terutama karena memperoleh variasi pemaknaan yang saling bertentangan.
4. Perubahan sosial boleh jadi menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi dalam waktu yang bersamaan justru dapat merugikan pihak-pihak tertentu yang lainnya.

[17] Macionis, J. J. pada ***Sociology: Sixth edition*** (1997)

(halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 4
KONSEP DESAIN

4.1 Eksplorasi Formal

4.1.1 Proses Desain Partisipatif

Tabel 4.1 Proses Desain Partisipatif Warga Kampung Mrican

Proses	Kegiatan	Dokumentasi
Pemetaan	Menggambar peta untuk mengidentifikasi lingkungan, keadaan fisik dan sosial	
Analisa Peta	Menganalisa dan menghimpun data, masalah dan potensi lingkungan yang muncul dari pemetaan	
Perencanaan	Melakukan perencanaan desain secara detail dan terukur menggunakan media maket kawasan kampung berdasarkan hasil Analisa peta	

Perancangan	Membuat maket hunian warga sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Warga akan lebih mudah membayangkan desain huniannya nanti ketika menggunakan media 3 dimensi	

Sumber: Hasil Analisis, 2017

4.1.2 Jenis dan Kriteria Rumah Terdampak Penataan Permukiman di Mrican

Tabel 4.2 Jenis dan Kriteria Rumah Terdampak di Mrican

Pemugaran dan Peremajaan Fasad	Pemugaran dan Penambahan Massa Vertikal	Relokasi di Tanah Kas Desa
Luas maksimal terpugar ≤ 20% dari total luas rumah eksisting	Luas minimal terpugar > 20% - < 50% total luas rumah eksisting	Luas minimal terpugar > 50% dari total luas rumah eksisting

Sumber: Arkom Jogja, 2017

Pemerintah desa Caturtunggal telah menyediakan sejumlah persil lahan di area kampung Mrican yang nantinya akan digunakan untuk memfasilitasi warga terdampak relokasi penataan permukiman. Dengan pemilihan area yang juga berada pada kampung yang sama, diharapkan warga tidak kesusahan untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya.

4.1.3 Penetapan Kriteria Rumah Terdampak Penataan Permukiman pada RT 14 dan Sebagian RT 16

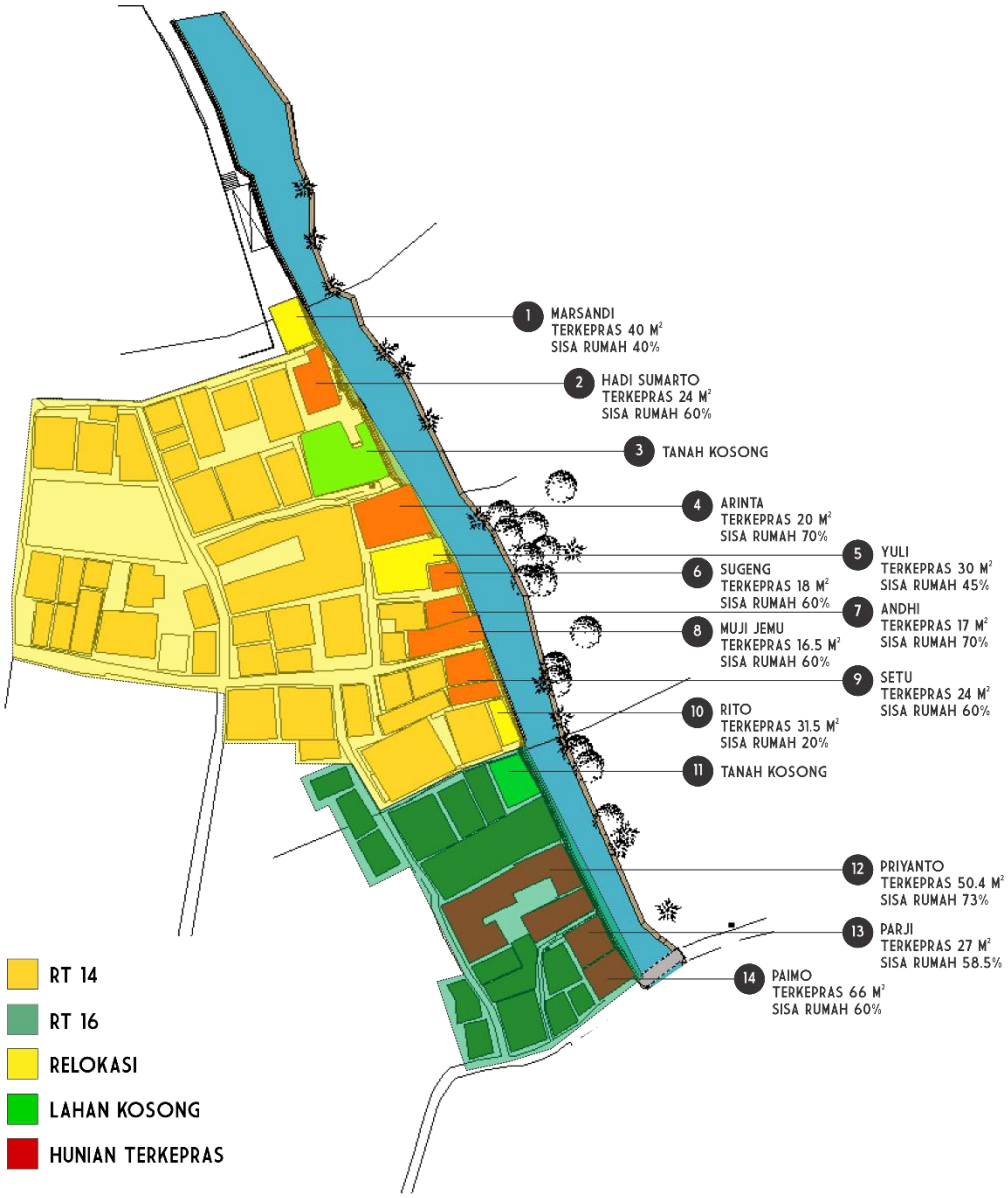

Gambar 4.1 Penetapan Kriteria Rumah Terdampak (Arkom Jogja, 2017)

4.1.4 Konsep Desain Terintegrasi

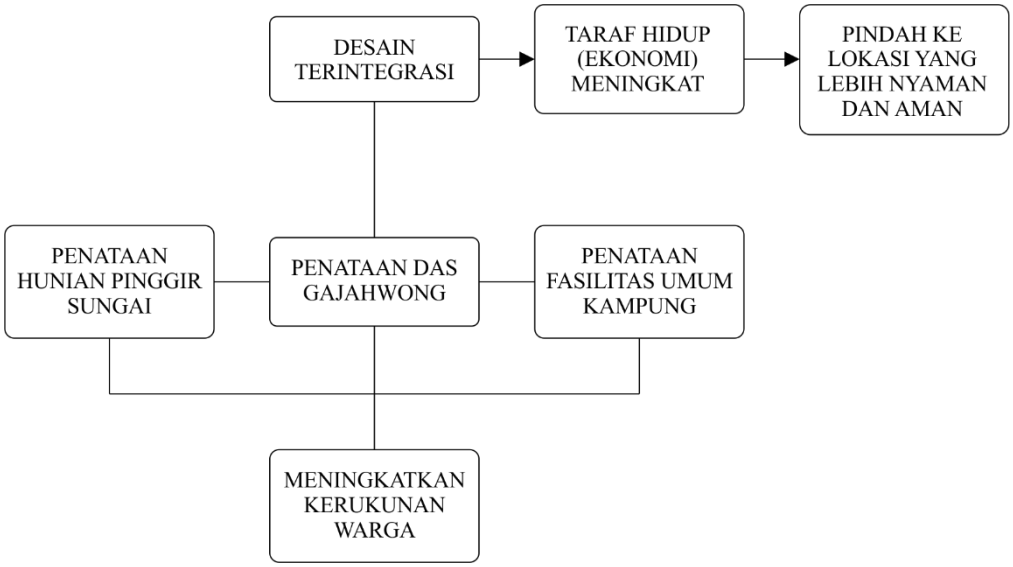

Gambar 4.2 Konsep Desain Terintegrasi (Hasil Analisis, 2017)

Desain terintegrasi pada kampung Mrican meliputi penataan aspek fisik yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kerukunan antar warga disana karena pada dasarnya mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu pindah ke lokasi yang lebih nyaman dan aman. Penataan aspek fisik yang ada di kampung Mrican mempunyai orientasi untuk meningkatkan taraf hidup warganya dalam hal ekonomi sebagai bekal finansial untuk dapat memiliki tempat berhuni yang baru.

4.1.4.1 Penataan Hunian Pinggir Sungai

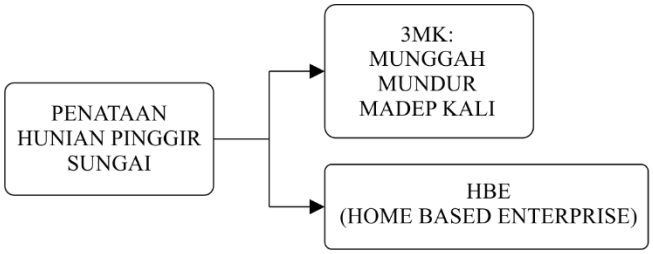

Gambar 4.3 Konsep Penataan Hunian Pinggir Sungai (Hasil Analisis, 2017)

4.1.4.1.1 Konsep Munggah, Mundur, Madep Kali

Konsep ini sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai garis sempadan sungai sebesar 3 m. Munggah mempunyai arti bahwa bagian yang terpotong jika luasannya sebesar 20-50% dari hunian eksisting maka bagian tersebut akan

dipindah secara vertikal. Mundur disini mempunyai pengertian bahwa hunian warga yang berada pada garis sempadan sungai atau bahkan melebihi garis sempadan sungai tersebut akan dipotong atau mundur sebesar 3 m. Sedangkan madep kali berarti orientasi hunian terpotong yang sebelumnya berada pada arah yang lain akan diarahkan untuk menghadap sungai dengan maksud agar mendukung konsep wisata sungai Gajahwong.

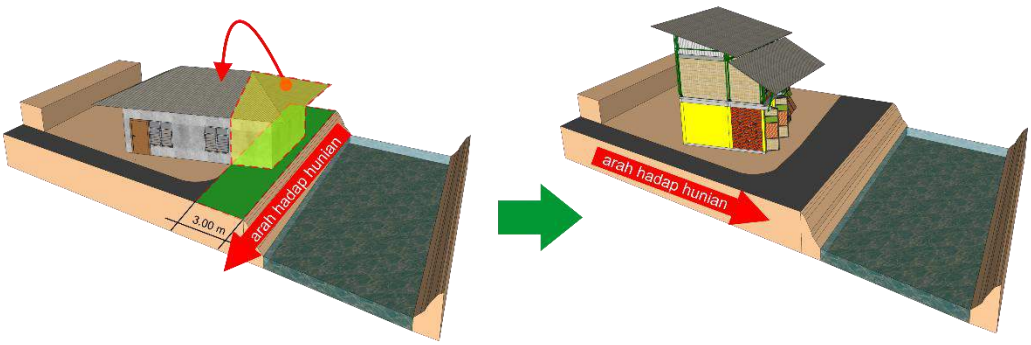

Gambar 4.4 Konsep Munggah, Mundur Madep Kali (Hasil Analisis, 2017)

4.1.4.1.2 HBE (*Home Based Enterprise*)

Konsep ini sebagai salah satu usaha dalam mendukung wisata sungai Gajahwong. HBE bisa berupa tempat makan yang ada di sungai.

HBE juga dapat tidak berhubungan dengan wisata sungai, seperti contohnya penjual nasi gudeg, penjahit pakaian, toko kelontong dan sebagainya. Tetapi tetap tujuan utama dari HBE ini adalah meningkatkan perekonomian warga tepi sungai yang terdampak agar lebih cepat memulihkan finansial mereka yang terganggu adanya dengan penataan permukiman tepi sungai tersebut.

Gambar 4.5 Ilustrasi HBE Warga Mrican (Hasil Analisis, 2017)

4.1.4.2 Penataan DAS Gajahwong

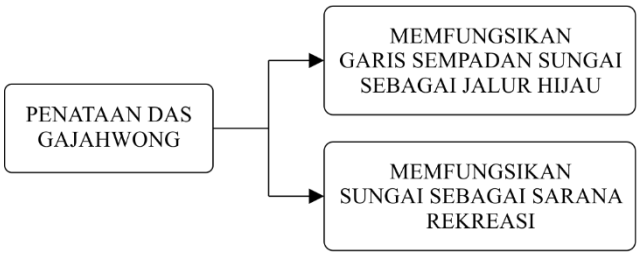

Gambar 4.6 Konsep Penataan DAS Sungai Gajahwong
(Hasil Analisis, 2017)

4.1.4.2.1 Memfungsikan Garis Sempadan Sungai sebagai Jalur Hijau

Ruang selebar 3 m sebagai garis sempadan sungai nantinya akan digunakan sebagai jalan inspeksi dan juga jalur penghijauan. Konsep ini bermaksud agar warga dan pengunjung mudah untuk mengakses sungai sebagai sarana rekreasi. Selain itu konsep ini juga bertujuan membuat daerah aliran sungai Gajahwong menjadi lebih rapi dan terawat.

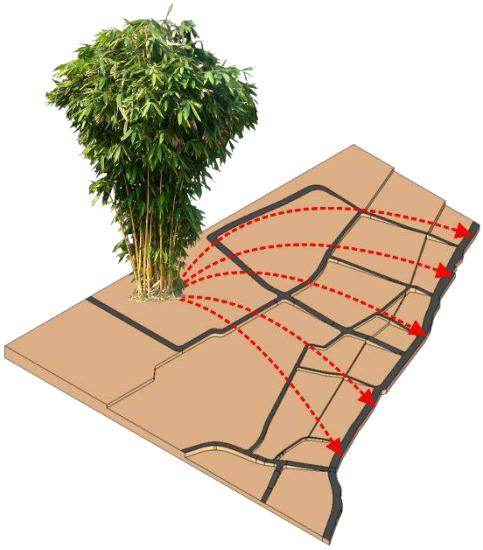

Gambar 4.7 Garis Sempadan Sungai
sebagai Jalur Hijau
(Hasil Analisis, 2017)

4.1.4.2.2 Memfungsikan Sungai sebagai Sarana Rekreasi

Sungai Gajahwong yang selama ini pemanfaatannya belum maksimal akan coba difungsikan sebagai area wisata sungai. Nantinya sepanjang sungai

Gajahwong akan terdapat spot-spot rakit bambu sebagai sarana pengunjung untuk memancing ikan. Terdapat juga rumah makan terapung pada sungai tersebut.

Tempat makan disana akan mengolah masakan dari hasil pengunjung memancing. Sehingga ketika pengunjung memancing disana akan langsung bisa menikmati ikan segar hasil memancingnya untuk dimakan. Tetapi untuk pengunjung yang berwisata ke kampung Mrican tidak untuk memancing di sungai tetap bisa menikmati olahan ikan disana. Selain berfungsi sebagai tempat makan terdapat fungsi lain yaitu sebagai tempat pengunjung untuk bersantai menikmati aliran sungai sembari melihat aktivitas memancing yang ada disana.

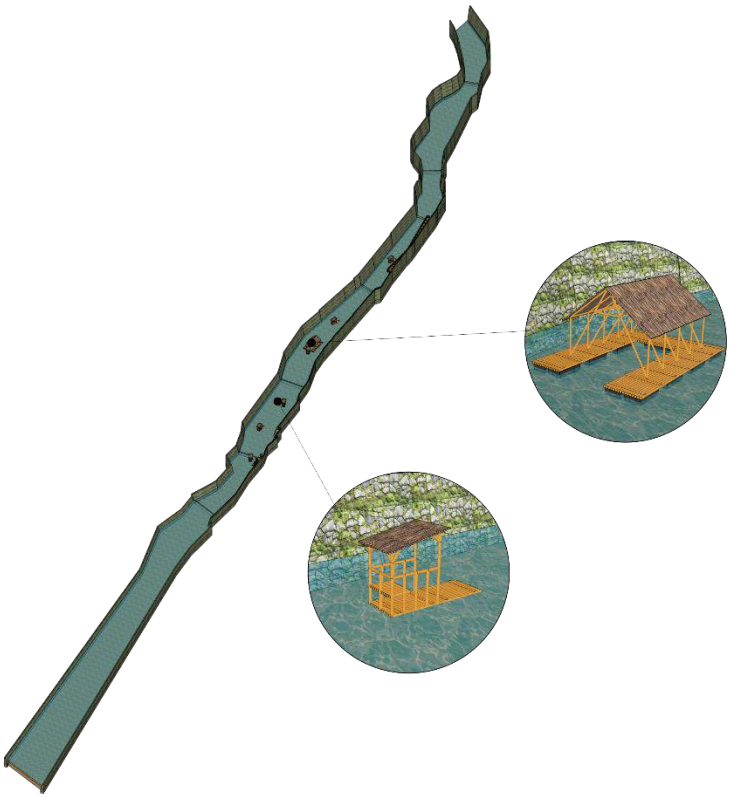

Gambar 4.8 DAS Gajahwong sebagai Sarana Rekreasi (Hasil Analisis, 2017)

4.1.4.3 Penataan Fasilitas Umum Kampung

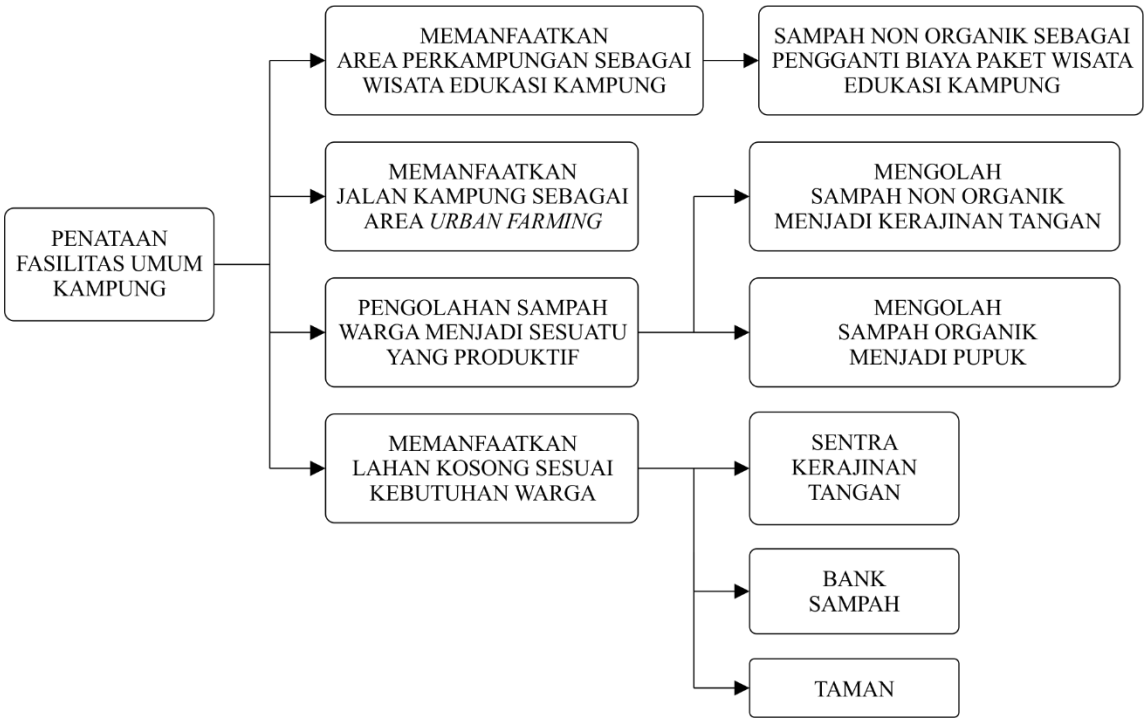

Gambar 4.9 Konsep Penataan Fasilitas Umum Kampung (Hasil Analisis, 2017)

4.1.4.3.1 Memanfaatkan Area Kampung Sebagai Wisata Edukasi Kampung

Area kampung yang sebelumnya hanya sebagai tempat bermukim akan coba dimanfaatkan sebagai wisata edukasi kampung. Wisata edukasi ini bermaksud untuk memberikan pengetahuan kepada para pengunjung tentang bagaimana kampung ini bertranformasi dari kampung biasa menjadi kampung yang produktif dan berwawasan lingkungan.

Wisata edukasi kampung ini menyediakan paket wisata dengan biaya pengganti berupa sampah non organik. Sampah non organik tersebut nantinya berfungsi sebagai salah satu sumber penyedia bahan baku bagi kerajinan tangan warga Mrican.

Gambar 4.10 Ilustrasi Wisata Edukasi Kampung Kampung (Hasil Analisis, 2017)

4.1.4.3.2 Memanfaatkan Jalan Kampung sebagai Area *Urban Farming*

Warga kampung Mrican selama ini belum memanfaatkan perbedaan ketinggian jalan kampung mereka. *Space* yang berada pada lahan dengan perbedaan ketinggian tersebut akan coba dimanfaatkan untuk area *urban farming*.

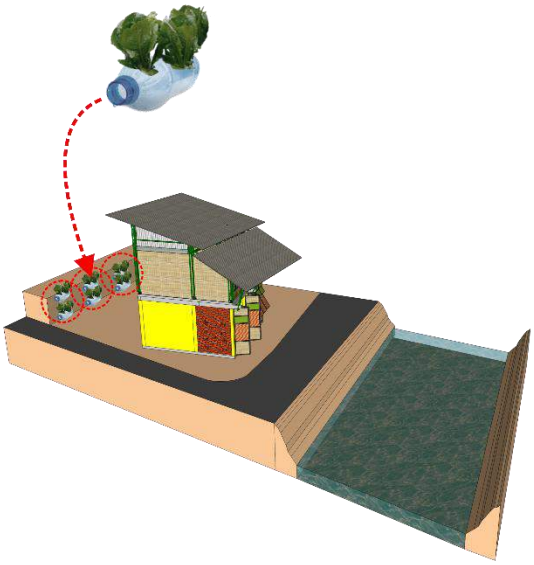

Gambar 4.11 Pemanfaatan Jalan Kampung
sebagai Area *Urban Farming*
(Hasil Analisis, 2017)

Pada pelaksanaannya untuk pot tanaman akan memanfaatkan botol-botol bekas dari warga yang sebelumnya menjadi produk yang tidak bermanfaat. Sedangkan untuk pupuknya menggunakan pupuk hasil olahan dari sampah organik warga dengan komposter sampah organik. Sehingga hal ini dapat menekan biaya sekaligus memanfaatkan sampah yang selama ini belum dimanfaatkan.

Gambar 4.12 Proses Pengolahan Sampah Organik menjadi Pupuk Cair (https://abyspacetion.blogspot.co.id, 2016)

Gambar 4.13 Pemanfaatan Botol Bekas sebagai Pot Tanaman (http://ideproperti.com, 2015)

4.1.4.3.3 Pengolahan Sampah Warga Menjadi Sesuatu yang Produktif

Seluruh sampah di kampung Mrican akan dimanfaatkan sebagai sesuatu yang produktif, yaitu memanfaatkan sampah non organik menjadi bahan baku kerajinan tangan yang bernilai ekonomi tinggi.

Gambar 4.14 Contoh Hasil Kerajinan Tangan Warga Mrican
(http:// ideproperti.com, 2015)

Selain itu sampah organik juga dimanfaatkan menjadi pupuk cair yang nantinya akan digunakan untuk memupuk tanaman yang ada di sepanjang jalan kampung pada area yang memiliki perbedaan ketinggian.

Pengolahan sampah organik menjadi pupuk cair yaitu dengan menggunakan komposter sampah. Dipilihnya komposter sampah sebagai metode pengolahan sampah dikarenakan komposter tersebut terhitung murah dan cara penggunaannya pun mudah.

Gambar 4.15 Komposter Sampah Organik
(https://depokbebassampah.wordpress.com, 2015)

4.2 Eksplorasi Teknis

4.2.1 Kebutuhan Jumlah dan Besaran Ruang

4.2.1.1 Aktivitas Produksi

Tabel 4.3 Kebutuhan dan Besaran Ruang Aktivitas Produksi

No	Nama Ruang	Jumlah	Luasan Total
1.	Ruang Pameran	1	80 m^2
2.	Ruang Workshop	1	117 m^2
3.	Toilet Sentra Kerajinan	1	3 m^2
4.	*Urban Farming*	-	Sepanjang Jalan Kampung
5.	Bank Sampah	1	88 m^2
6.	Segmentasi Sungai	-	1687.2 m^2
Total Luas Area			1975.2 m^2

Sumber: Hasil Analisis, 2017

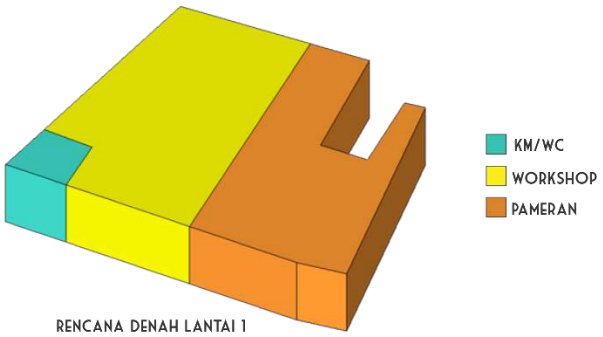

Gambar 4.16 Blok Massa Sentra Kerajinan Tangan (Hasil Analisis, 2017)

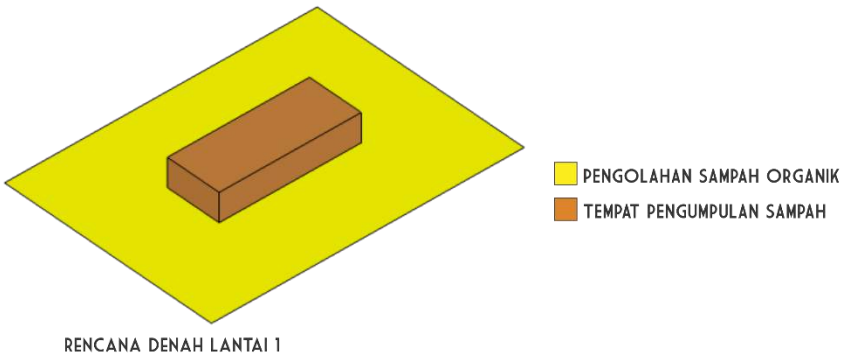

Gambar 4.17 Blok Massa Bank Sampah (Hasil Analisis, 2017

4.2.2.2 Relaksasi

Tabel 4.4 Kebutuhan dan Besaran Ruang Aktivitas Relaksasi

No	Nama Ruang	Jumlah	Luasan Total
1.	Taman	3	115 m^2
Total Luas Area			150 m^2

Sumber: Hasil Analisis, 2017

4.2.2.3 Aktivitas Bermukim

Tabel 4.5 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Paimo

No	Nama Ruang	Jumlah	Luasan Total
1.	Kamar Mandi	3	4.50 m^2
2.	Kamar Tidur	7	73.20 m^2
3.	Dapur	1	7 m^2
4.	Ruang Tamu	1	9.60 m^2
5.	Ruang Cuci Jemur	1	5 m^2
6.	Balkon	2	10.80 m^2
7.	Garasi	1	10.50 m^2
8.	Pos Ronda	1	13 m^2
7.	Sirkulasi	-	50.15 m^2
Total Luas Area			183.75 m^2

Sumber: Hasil Analisis, 2017

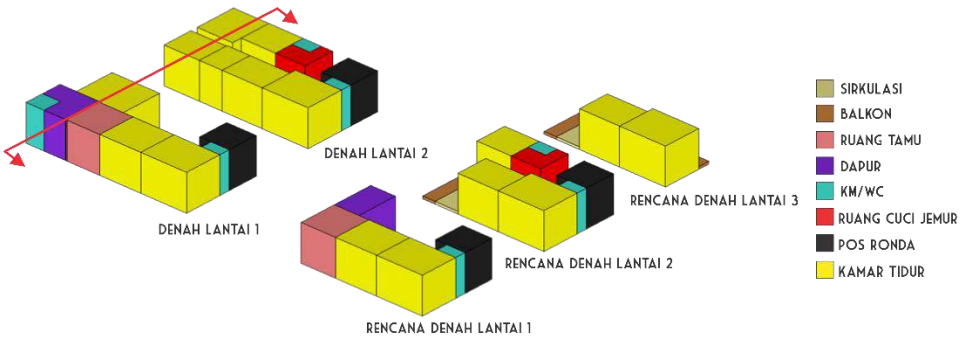

Gambar 4.18 Blok Massa Rumah Bapak Paimo (Hasil Analisis, 2017)

Tabel 4.6 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Parji

No	Nama Ruang	Jumlah	Luasan Total
1.	Kamar Mandi	3	6.75 m^2
2.	Kamar Tidur	5	36.50 m^2
3.	Dapur	1	4.50 m^2
4.	Ruang Tamu	1	9 m^2
5.	Salon	1	11.25 m^2
6.	Teras	1	4.50 m^2
7.	Balkon	1	9.75 m^2
7.	Sirkulasi	-	3.25 m^2
Total Luas Area			85.50 m^2

Sumber: Hasil Analisis, 2017

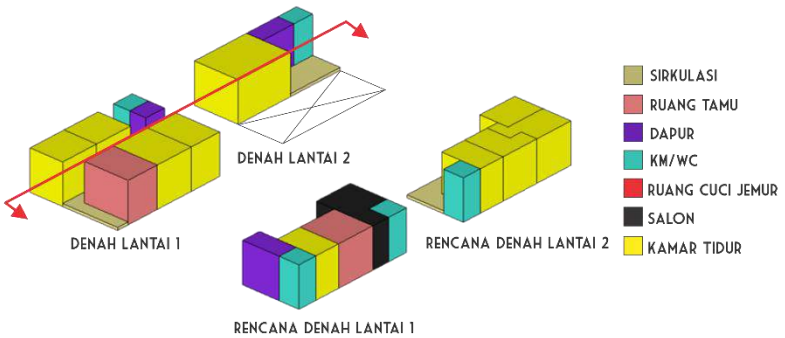

Gambar 4.19 Blok Massa Rumah Bapak Parji (Hasil Analisis, 2017)

Tabel 4.7 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Priyanto

No	Nama Ruang	Jumlah	Luasan Total
1.	Kamar Mandi	2	6 m^2
2.	Kamar Tidur	12	92.83 m^2
3.	Sirkulasi	-	44.92 m^2
Total Luas Area			143.75 m^2

Sumber: Hasil Analisis, 2017

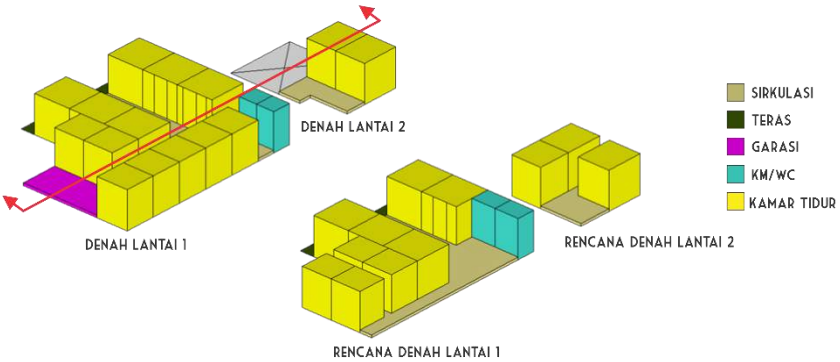

Gambar 4.20 Blok Massa Hunian Bapak Priyanto (Hasil Analisis, 2017)

Tabel 4.8 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Muji Setu

No	Nama Ruang	Jumlah	Luasan Total
1.	Kamar Mandi	2	4 m^2
2.	Kamar Tidur	3	24 m^2
3.	Dapur	1	6 m^2
4.	Ruang Tamu	1	9 m^2
5.	Ruang Keluarga	1	9 m^2
6.	Ruang Cuci Jemur	1	6 m^2
7.	Teras	1	5 m^2
8.	Balkon	1	5 m^2
9.	Sirkulasi	-	12 m^2
Total Luas Area			102 m^2

Sumber: Hasil Analisis, 2017

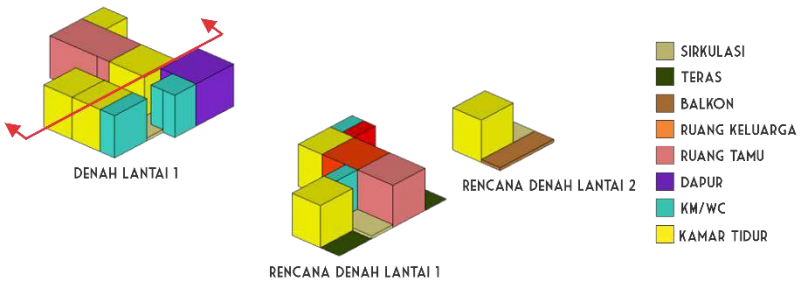

Gambar 4.21 Blok Massa Rumah Bapak Setu (Hasil Analisis, 2017)

Tabel 4.9 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Muji

No	Nama Ruang	Jumlah	Luasan Total
1.	Kamar Mandi	1	2 m^2
2.	Kamar Tidur	4	24.50 m^2
3.	Dapur	1	6.25 m^2
4.	Ruang Tamu	1	7.50 m^2
5.	Ruang Keluarga	1	3.75 m^2
6.	Ruang Cuci Jemur	1	2 m^2
7.	Sirkulasi	-	14.38 m^2
Total Luas Area			60.38 m^2

Sumber: Hasil Analisis, 2017

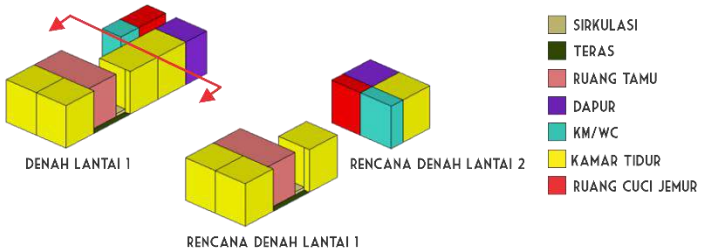

Gambar 4.22 Blok Massa Rumah Bapak Muji
(Hasil Analisis, 2017)

Tabel 4.10 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Andhi

No	Nama Ruang	Jumlah	Luasan Total
1.	Kamar Mandi	1	2 m^2
2.	Kamar Tidur	2	14.40 m^2
3.	Dapur	1	6 m^2
4.	Ruang Tamu + Ruang Keluarga	1	11.25 m^2
5.	Teras	2	4.90 m^2
7.	Sirkulasi	-	5.45 m^2
Total Luas Area			44 m^2

Sumber: Hasil Analisis, 2017

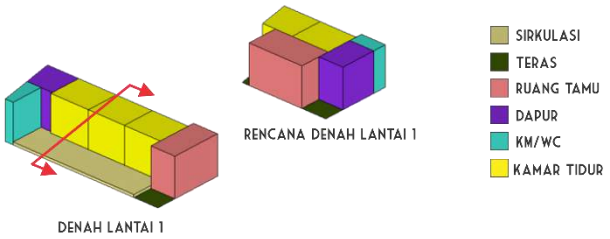

Gambar 4.23 Blok Massa Rumah Bapak Andhi
(Hasil Analisis, 2017)

Tabel 4.11 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Sugeng

No	Nama Ruang	Jumlah	Luasan Total
1.	Kamar Mandi	2	2.50 m^2
2.	Kamar Tidur	2	18 m^2
3.	Dapur	1	7.50 m^2
4.	Ruang Tamu	1	5.25 m^2
5.	Ruang Keluarga	1	12.75 m^2
6.	Ruang Cuci Jemur	1	1.75 m^2
7.	Sirkulasi	-	4.50 m^2
Total Luas Area			52.25 m^2

Sumber: Hasil Analisis, 2017

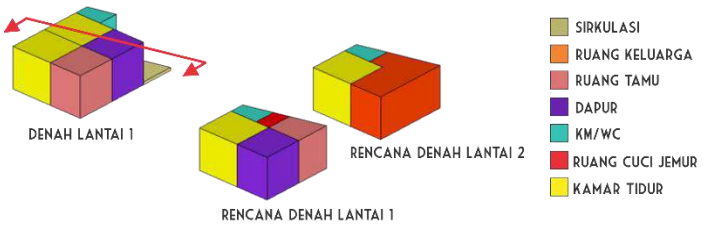

Gambar 4.24 Blok Massa Rumah Bapak Sugeng
(Hasil Analisis, 2017)

Tabel 4.12 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Arinta

No	Nama Ruang	Jumlah	Luasan Total
1.	Kamar Mandi	1	5.73 m^2
2.	Kamar Tidur	2	20.40 m^2
3.	Dapur	1	10.52 m^2
4.	Ruang Tamu	1	9 m^2
5.	Ruang Keluarga	1	15.2 m^2
6.	Ruang Cuci Jemur	1	4.35 m^2
7.	Sirkulasi	-	13.31 m^2
Total Luas Area			78.50 m^2

Sumber: Hasil Analisis, 2017

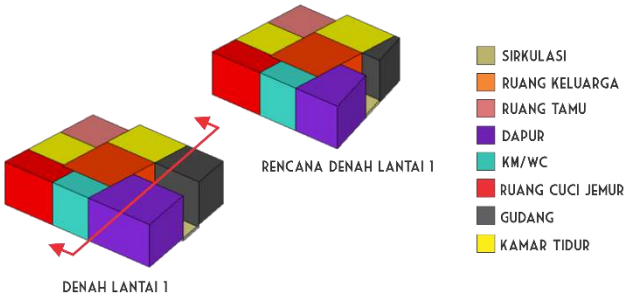

Gambar 4.25 Blok Massa Rumah Bapak Arinta
(Hasil Analisis, 2017)

Tabel 4.13 Kebutuhan dan Besaran Ruang Rumah Bapak Hadi

No	Nama Ruang	Jumlah	Luasan Total
1.	Kamar Mandi	3	7.87 m^2
2.	Kamar Tidur	4	42 m^2
3.	Dapur + Ruang Makan	1	14.35 m^2
4.	Ruang Tamu	1	22.50 m^2
5.	Ruang Keluarga	1	18 m^2
6.	Balkon	2	8 m^2
7.	Sirkulasi	-	37.28 m^2
Total Luas Area			150 m^2

Sumber: Hasil Analisis, 2017

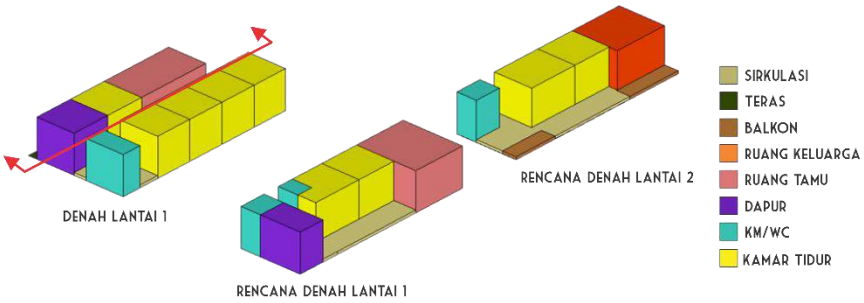

Gambar 4.26 Blok Massa Rumah Bapak Hadi (Hasil Analisis, 2017)

(halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 5

DESAIN

5.1 Eksplorasi Formal

Gambar 5.1 Site Plan (Hasil Analisa, 2018)

Gambar 5.2 Potongan Tapak dan Sungai (Hasil Analisa, 2018)

PERSPEKTIF
MATA BURUNG

Gambar 5.3 Perspektif Mata Burung (Hasil Analisa, 2018)

PERSPEKTIF
MATA NORMAL

Gambar 5.4 Perspektif Mata Normal (Hasil Analisa, 2018)

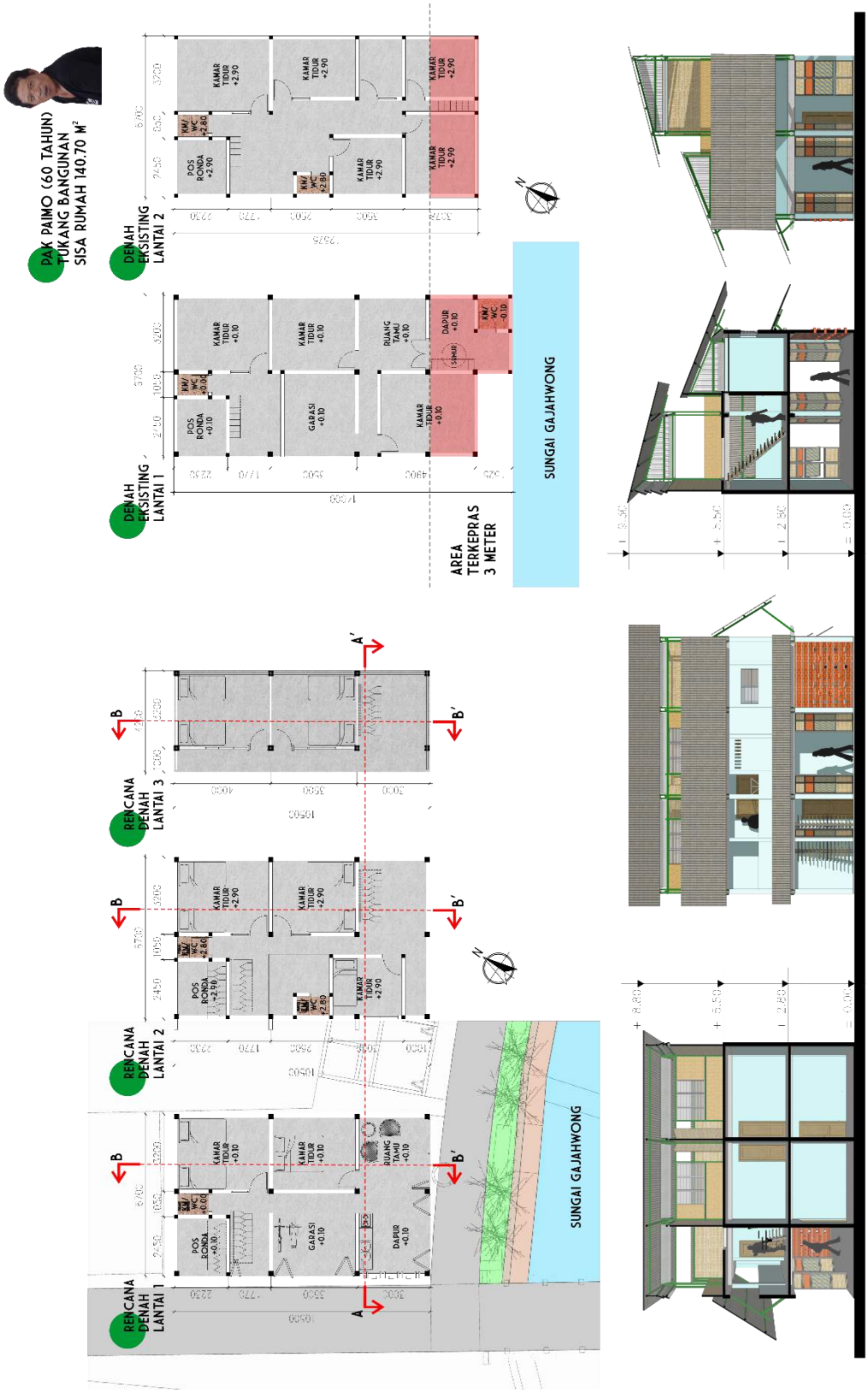

Gambar 5.5 Denah, Tampak, Potongan Rumah Pak Paimo (Hasil Analisa, 2018)

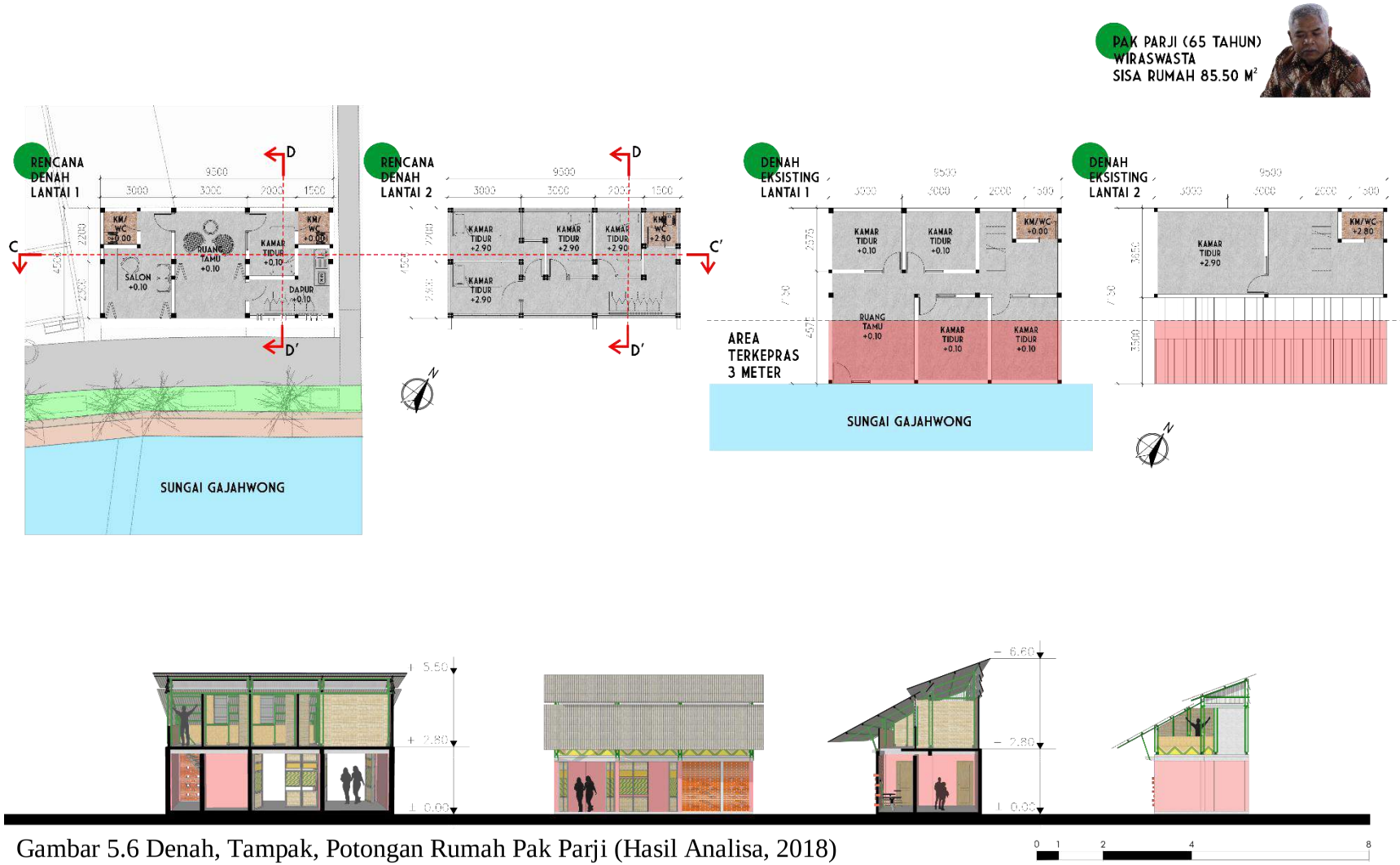

Gambar 5.6 Denah, Tampak, Potongan Rumah Pak Parji (Hasil Analisa, 2018)

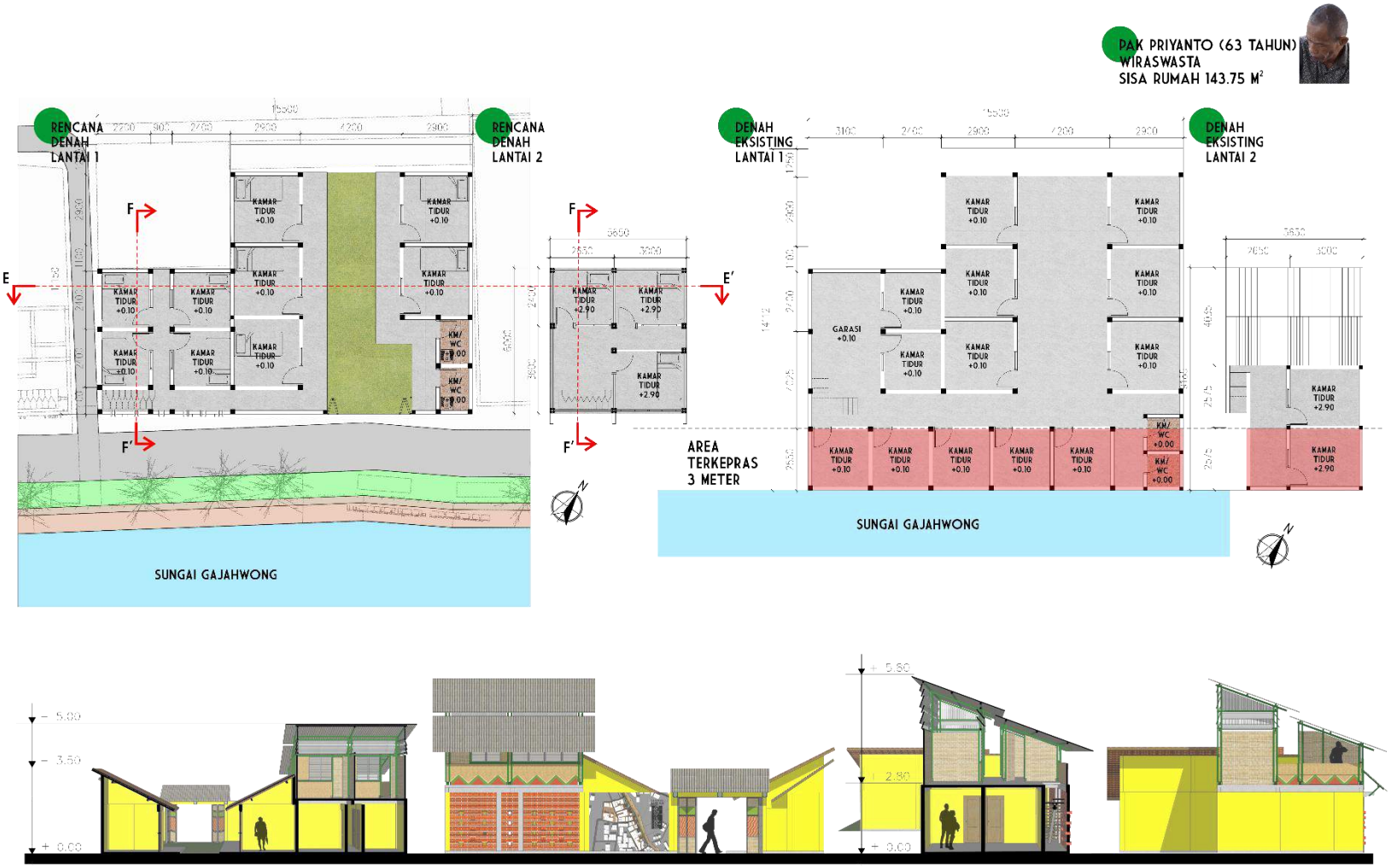

Gambar 5.7 Denah, Tampak, Potongan Rumah Pak Priyanto (Hasil Analisa, 2018)

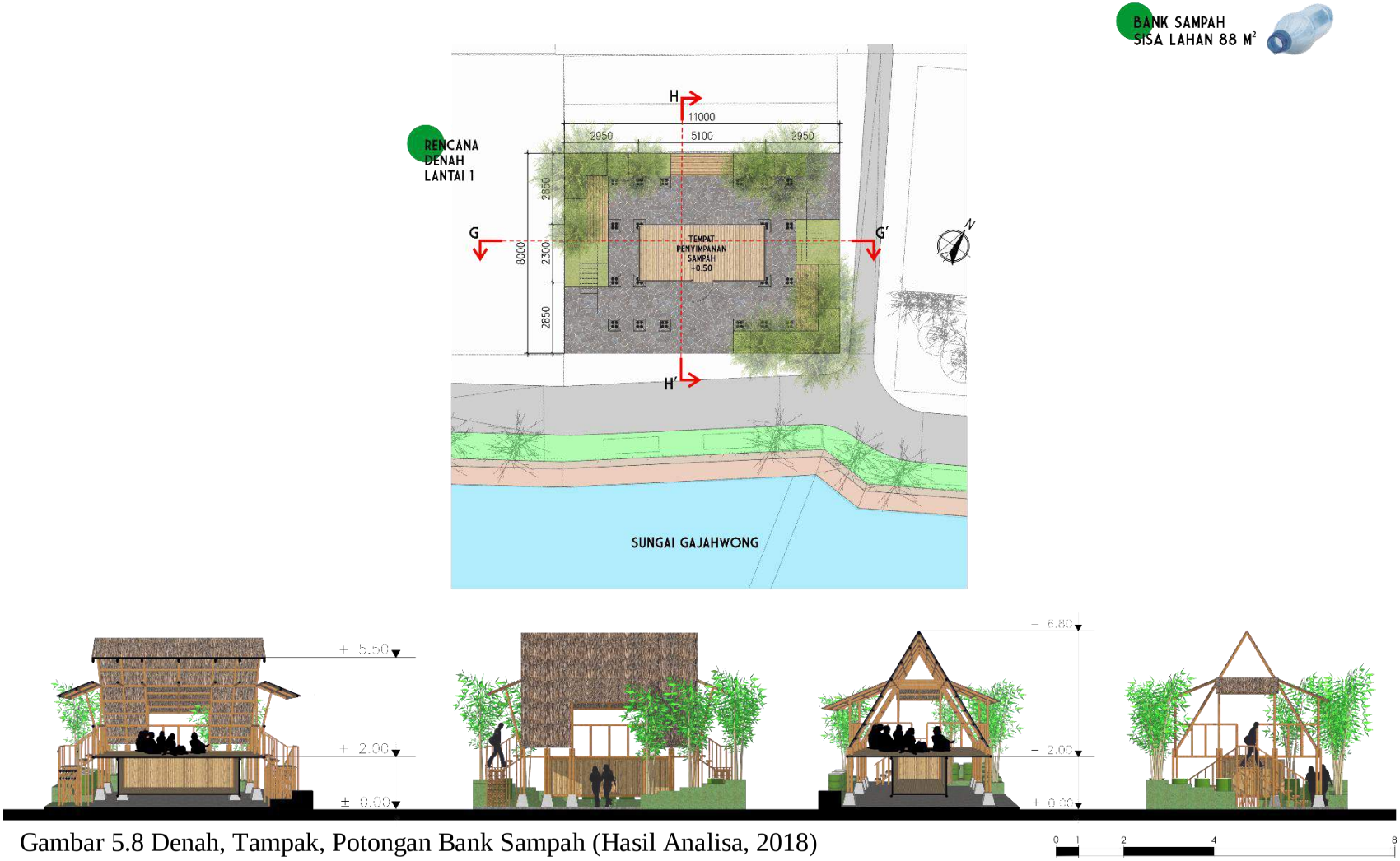

Gambar 5.8 Denah, Tampak, Potongan Bank Sampah (Hasil Analisa, 2018)

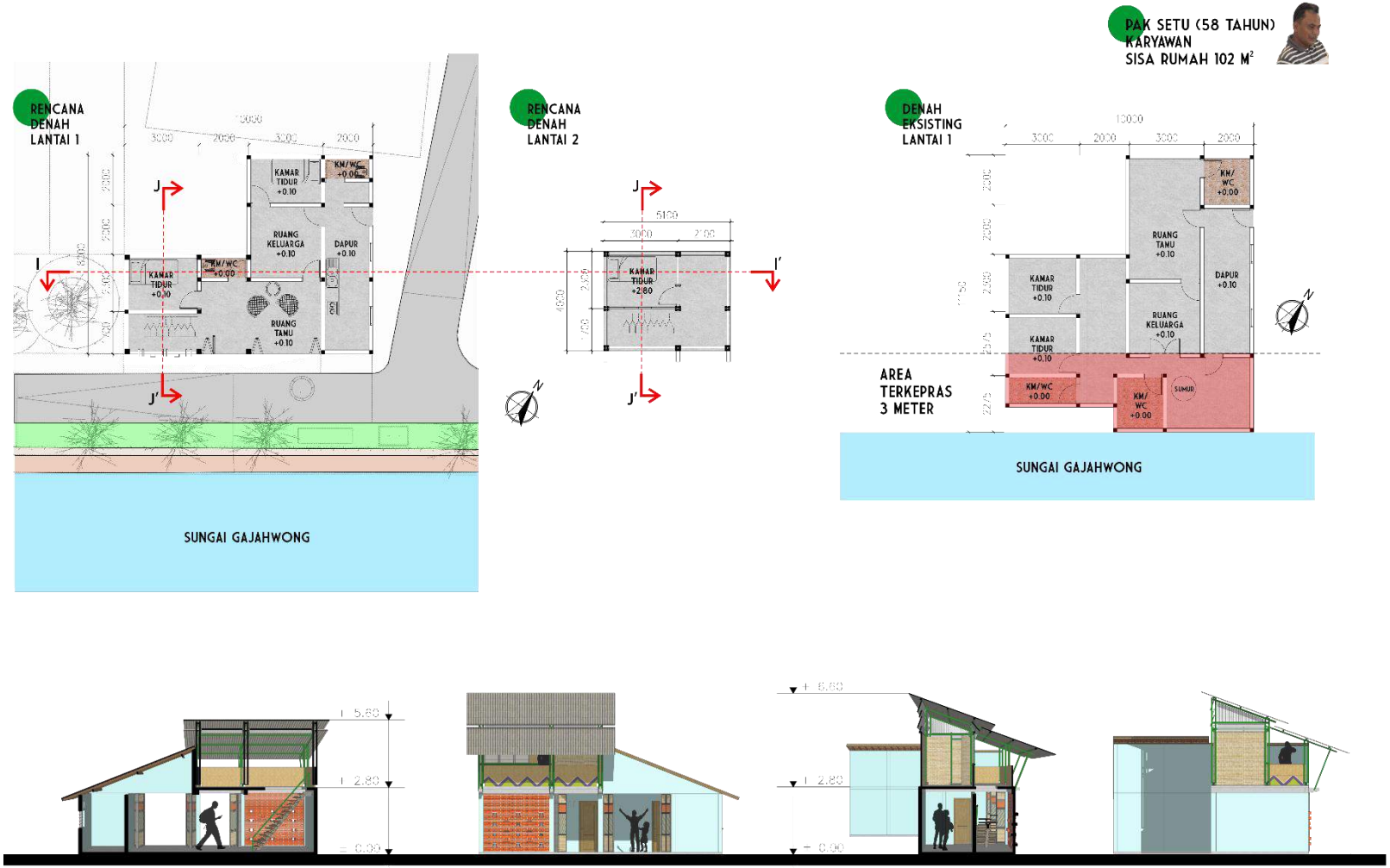

Gambar 5.9 Denah, Tampak, Potongan Rumah Pak Setu (Hasil Analisa, 2018)

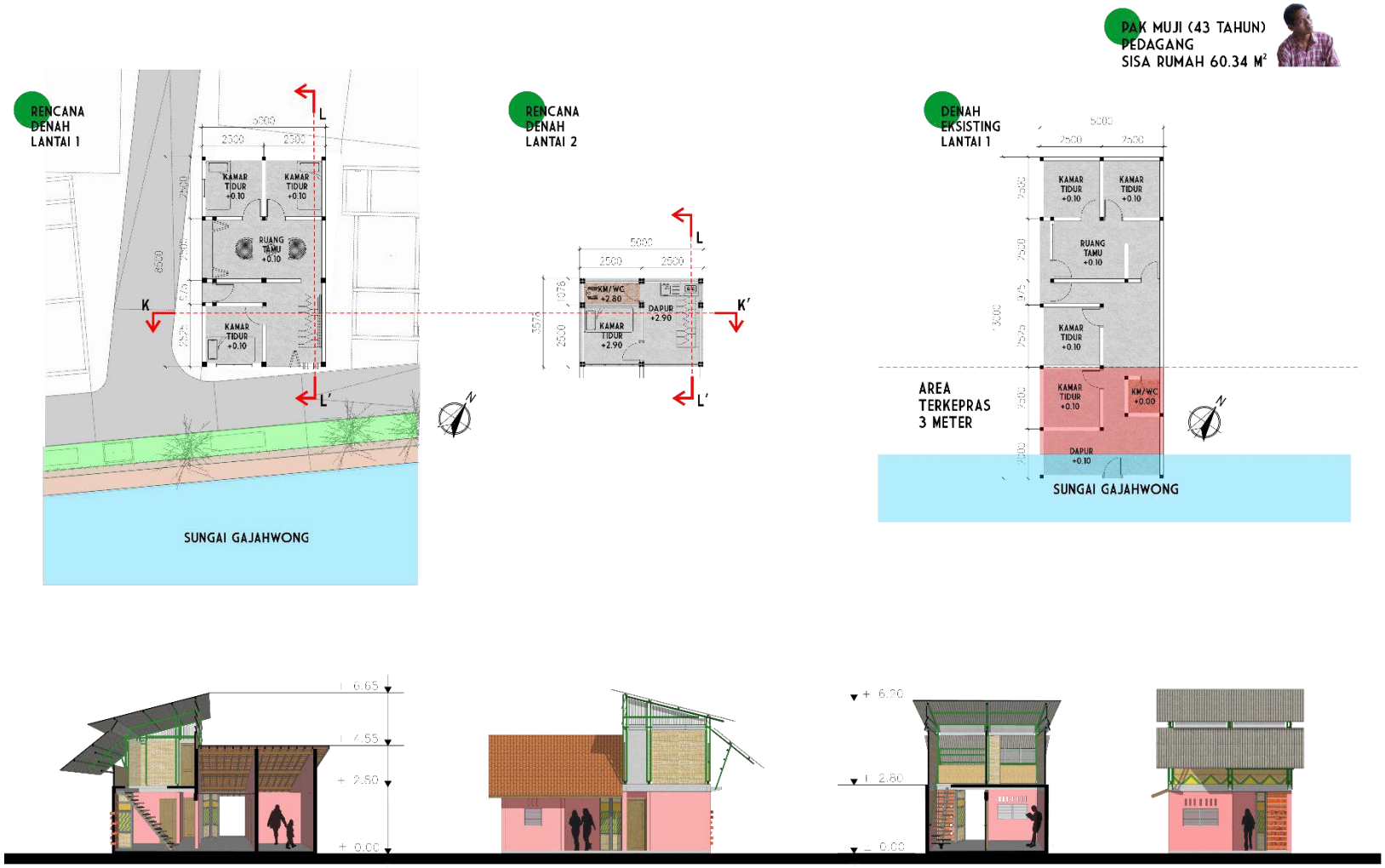

Gambar 5.10 Denah, Tampak, Potongan Rumah Pak Muji (Hasil Analisa, 2018)

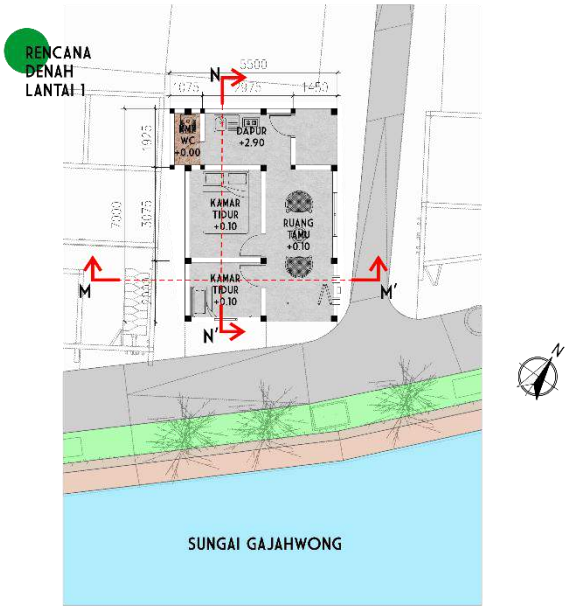

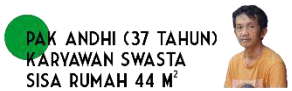

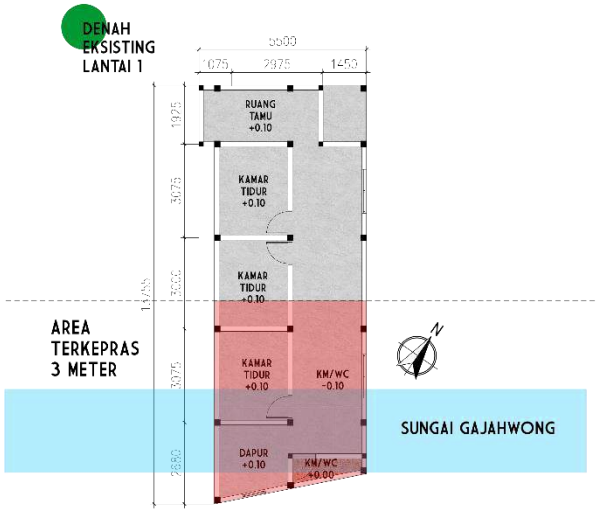

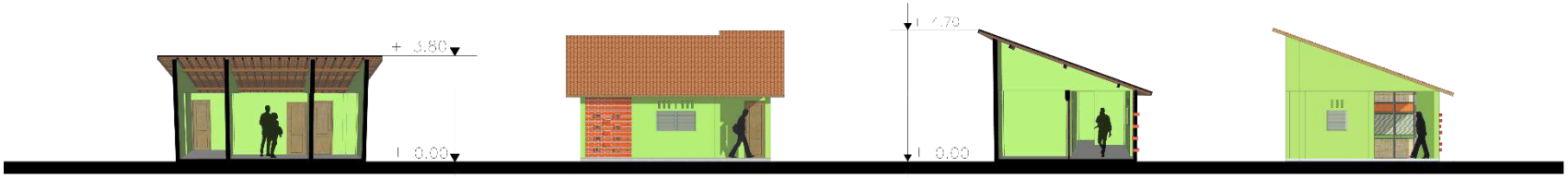

Gambar 5.11 Denah, Tampak, Potongan Rumah Pak Andhi (Hasil Analisa, 2018)

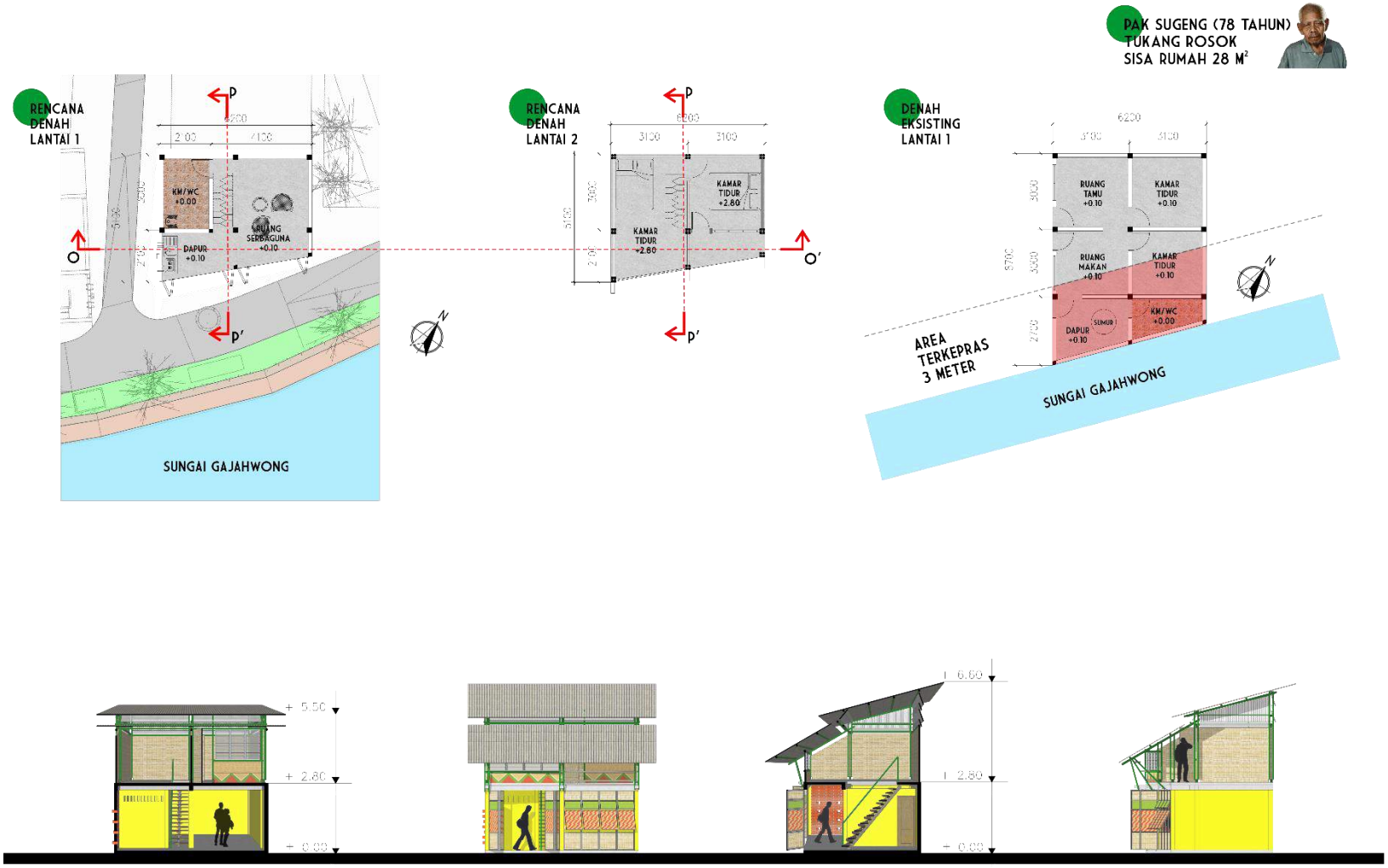

Gambar 5.12 Denah, Tampak, Potongan Rumah Pak Sugeng (Hasil Analisa, 2018)

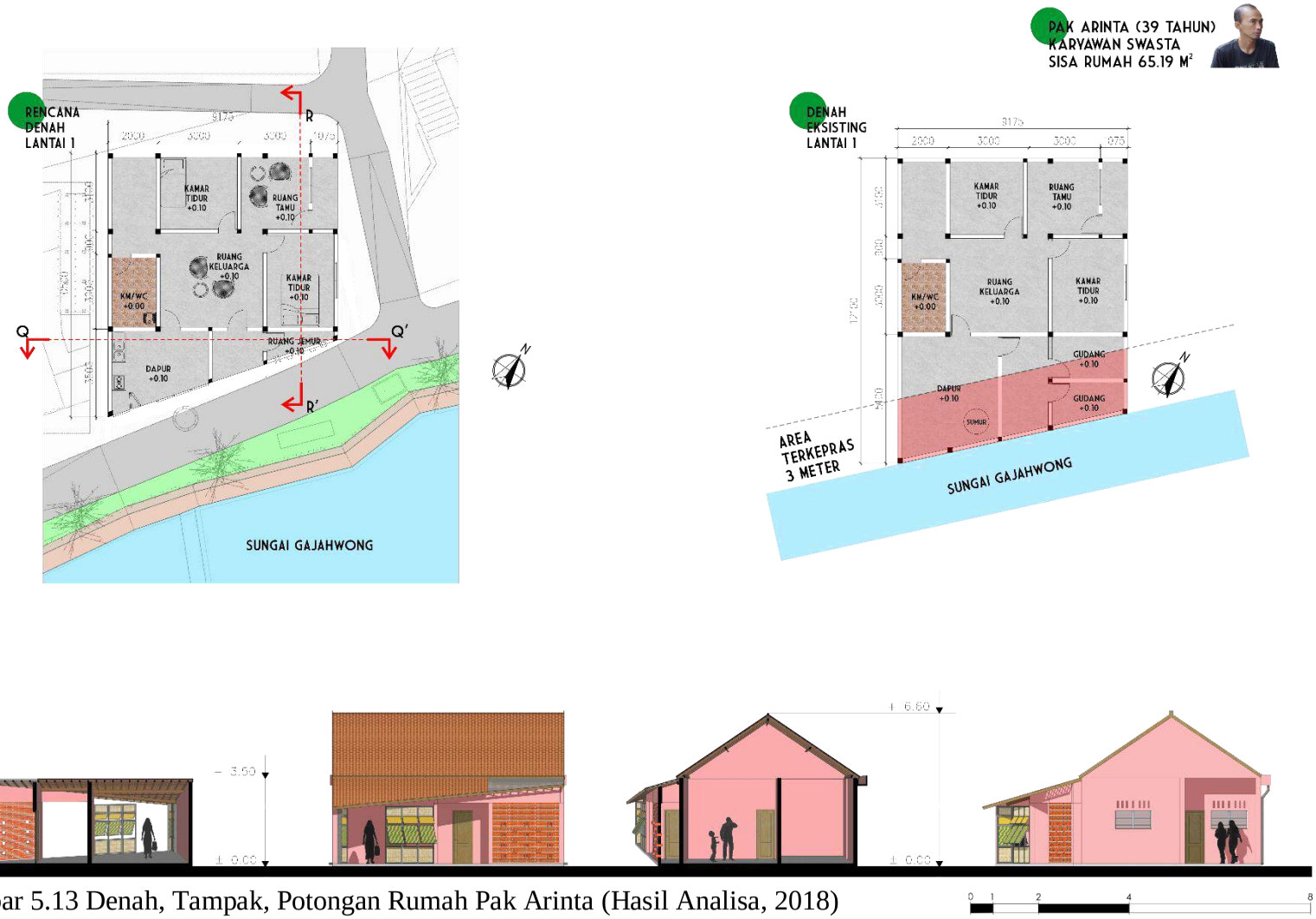

Gambar 5.13 Denah, Tampak, Potongan Rumah Pak Arinta (Hasil Analisa, 2018)

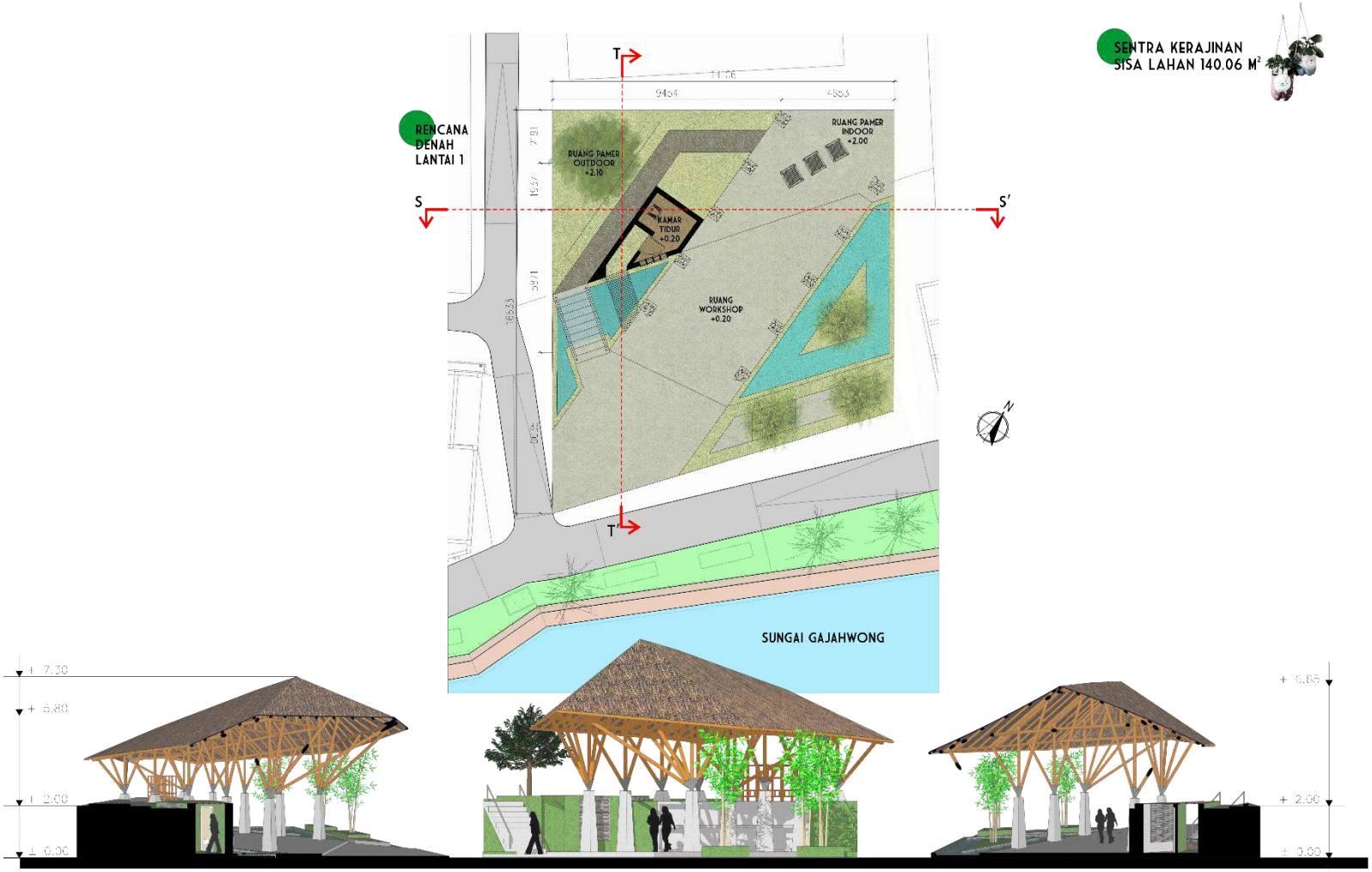

Gambar 5.14 Denah, Tampak, Potongan Sentra Kerajinan (Hasil Analisa, 2018)

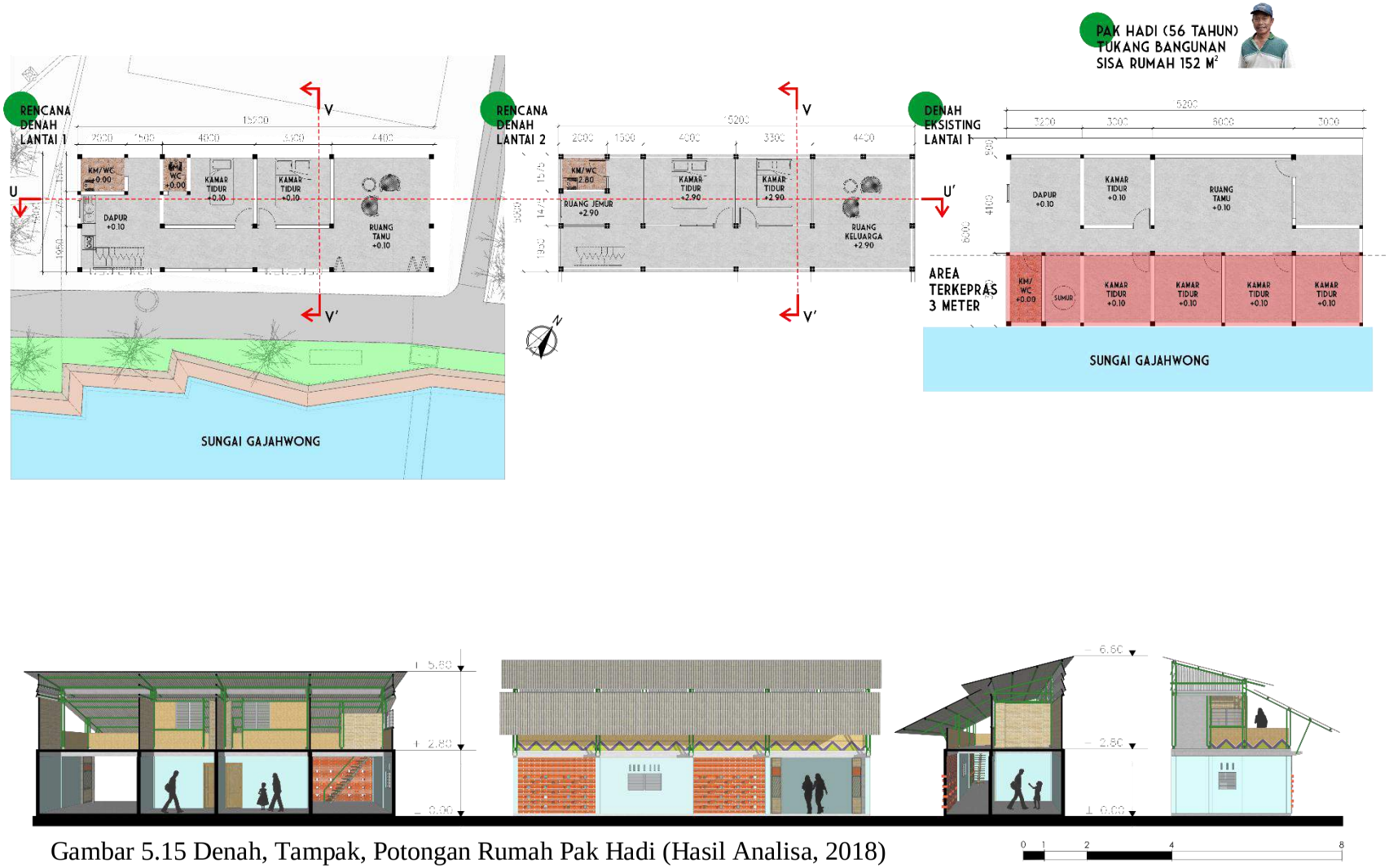

Gambar 5.15 Denah, Tampak, Potongan Rumah Pak Hadi (Hasil Analisa, 2018)

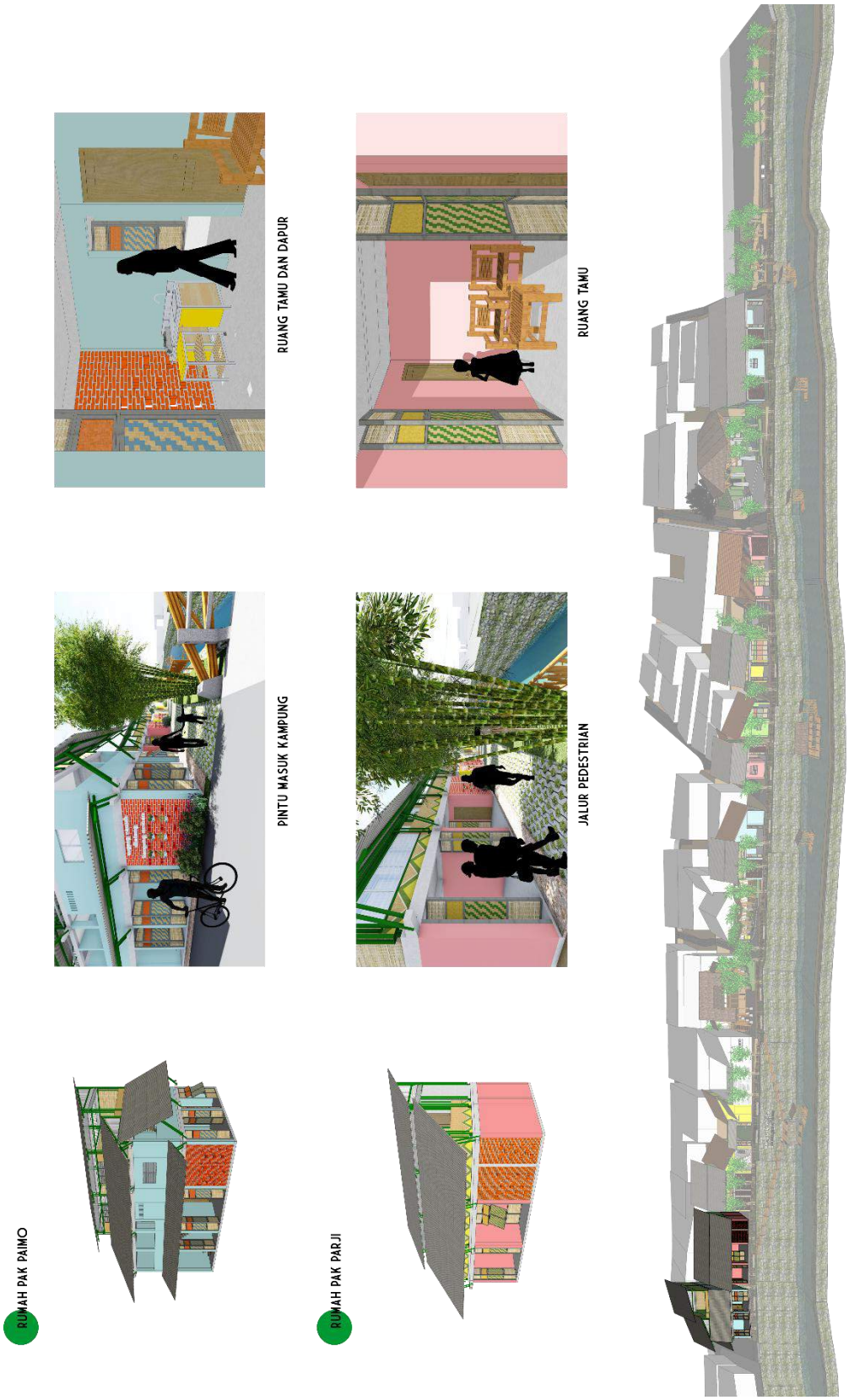

Gambar 5.16 Sekuen Wisata Kampung (Hasil Analisa, 2018)

Gambar 5.17 Sekuen Wisata Kampung (Hasil Analisa, 2018)

Gambar 5.18 Sekuen Wisata Kampung (Hasil Analisa, 2018)

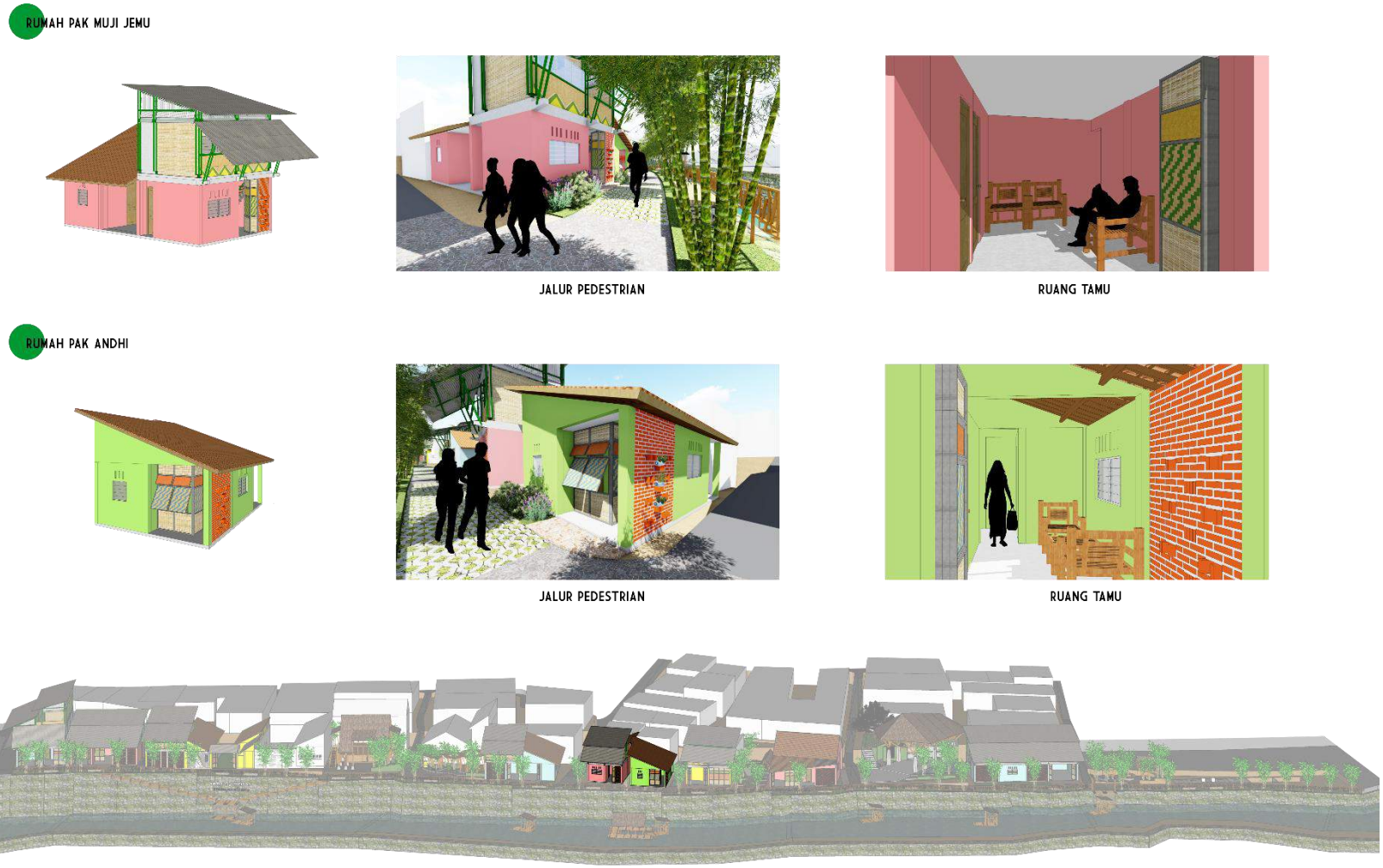

Gambar 5.19 Sekuen Wisata Kampung (Hasil Analisa, 2018)

Gambar 5.20 Sekuen Wisata Kampung (Hasil Analisa, 2018)

Gambar 5.21 Sekuen Wisata Kampung (Hasil Analisa, 2018)

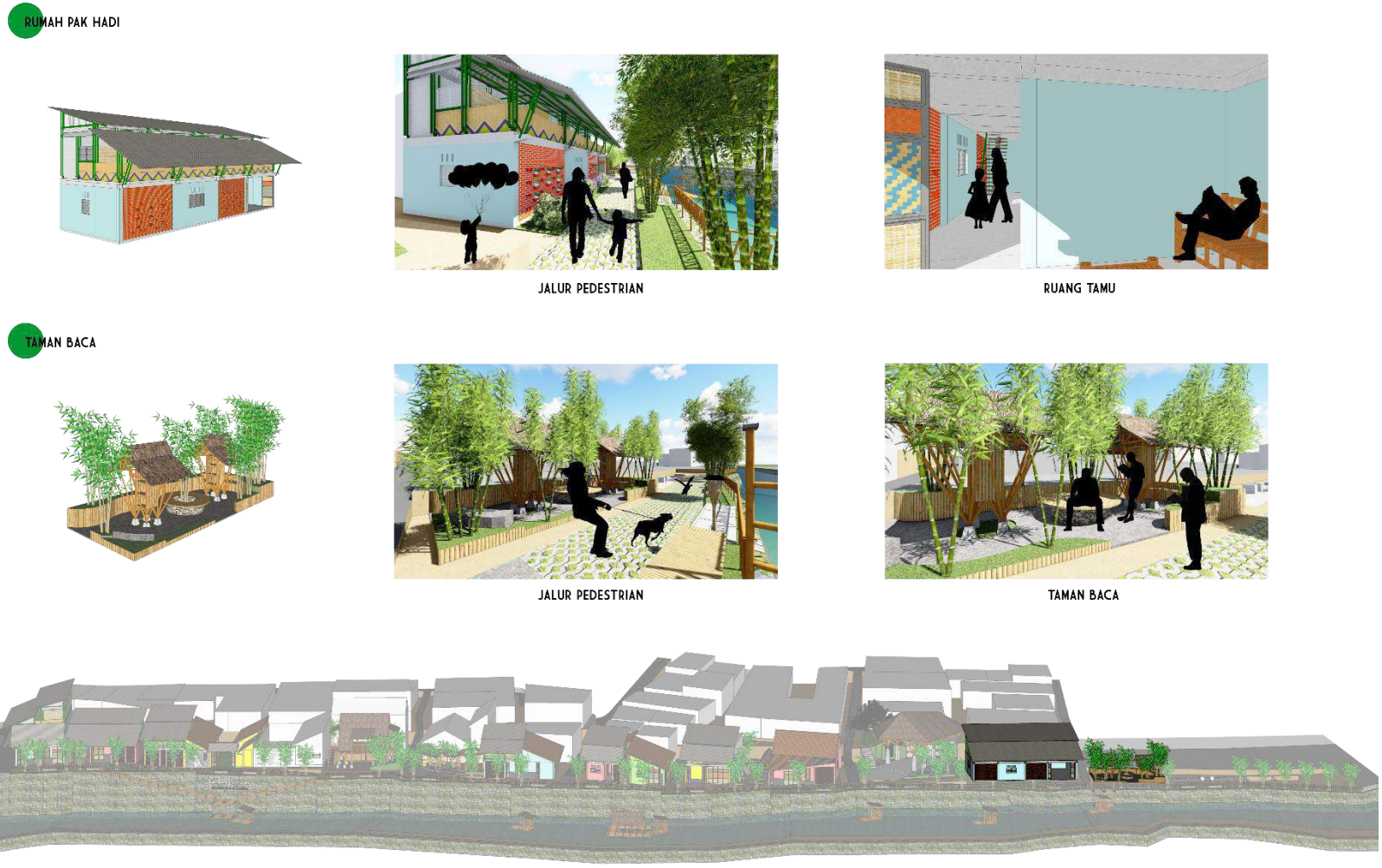

Gambar 5.22 Sekuen Wisata Kampung (Hasil Analisa, 2018)

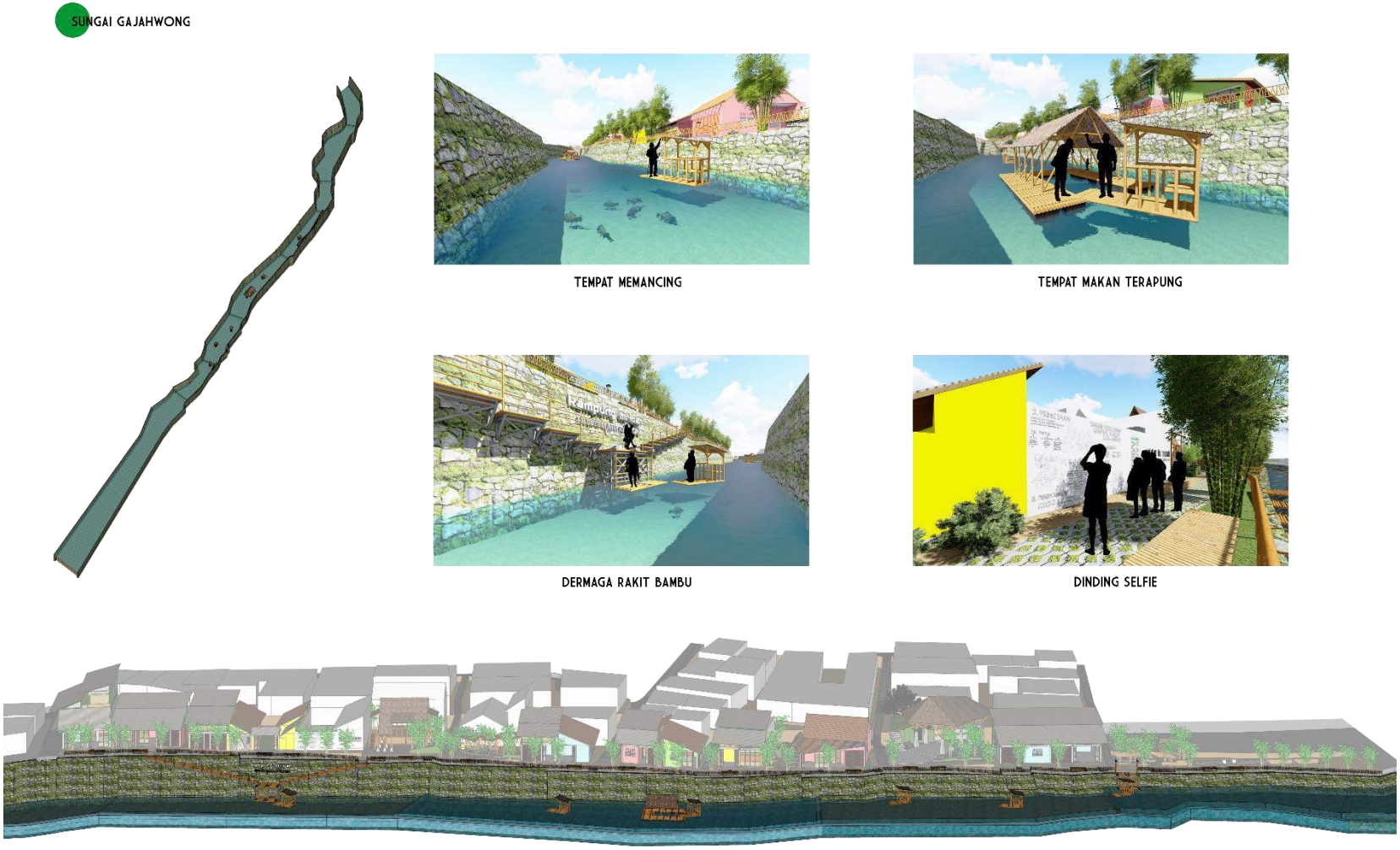

Gambar 5.23 Sekuen Wisata Kampung (Hasil Analisa, 2018)

5.2 Eksplorasi Teknis

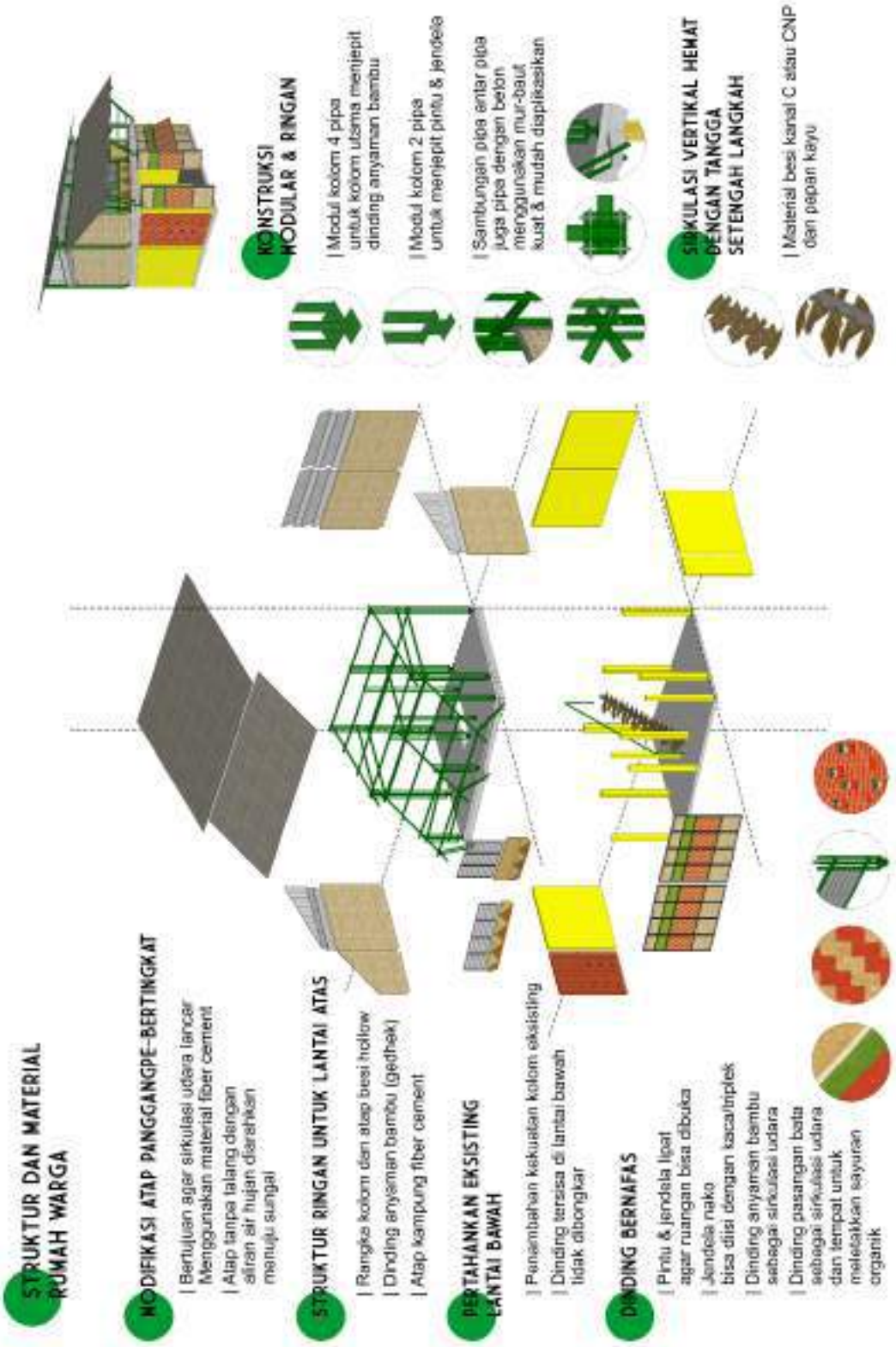

Gambar 5.24 Struktur dan Material Rumah Warga (Hasil Analisa, 2018)

STRUKTUR DAN MATERIAL BANK SAMPAH

MODIFIKASI ATAP PELANA

| Bertujuan agar memberikan kesan estetik Menggunakan material daun rumbia

| Atap tanpa talang dengan aliran air hujan diarahkan menuju sungai

SAMBUNGAN

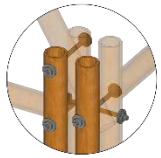

| Sambungan antara konstruksi atap dengan pondasi menggunakan mur-baut

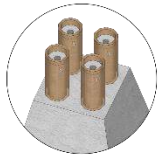

| Sambungan antara bambu dengan cor beton menggunakan semen dan besi sebagai pengikatnya

| Bambu dicor dengan besi dan semen pada ruas pertama saja

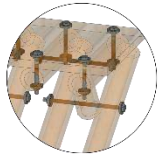

| Sambungan antar bambu pada tangga menggunakan sambungan mur-baut

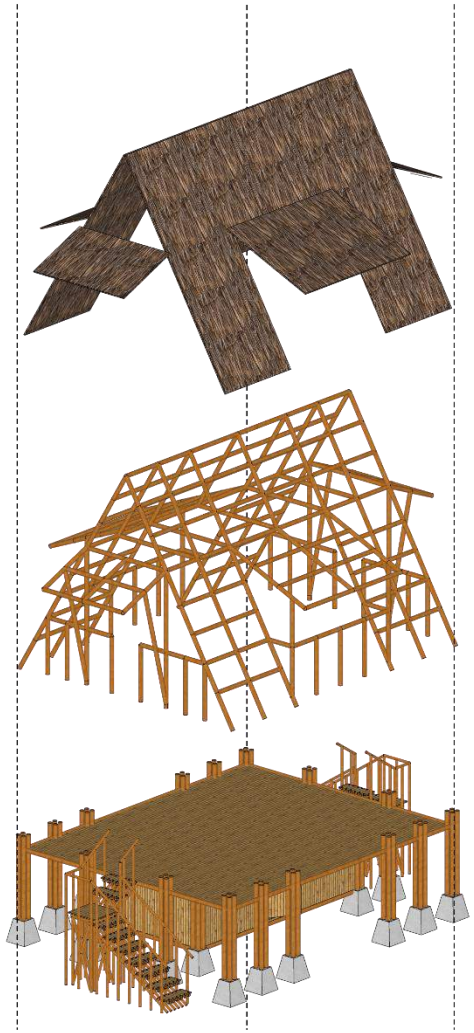

KONSTRUKSI ATAP

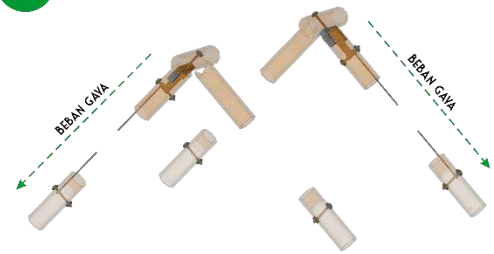

| Bagian atas bambu berupa sambungan antara bambu dengan besi penarik

| Bagian bawah bambu menggunakan perpaduan antara besi, semen dan mur-baut

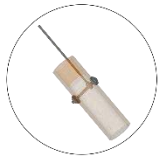

| Bagian atas dan bawah bambu dihubungkan dengan tali besi

| Konstruksi ini berselang-seling agar beban gaya merata

Gambar 5.25 Struktur dan Material Bank Sampah (Hasil Analisa, 2018)

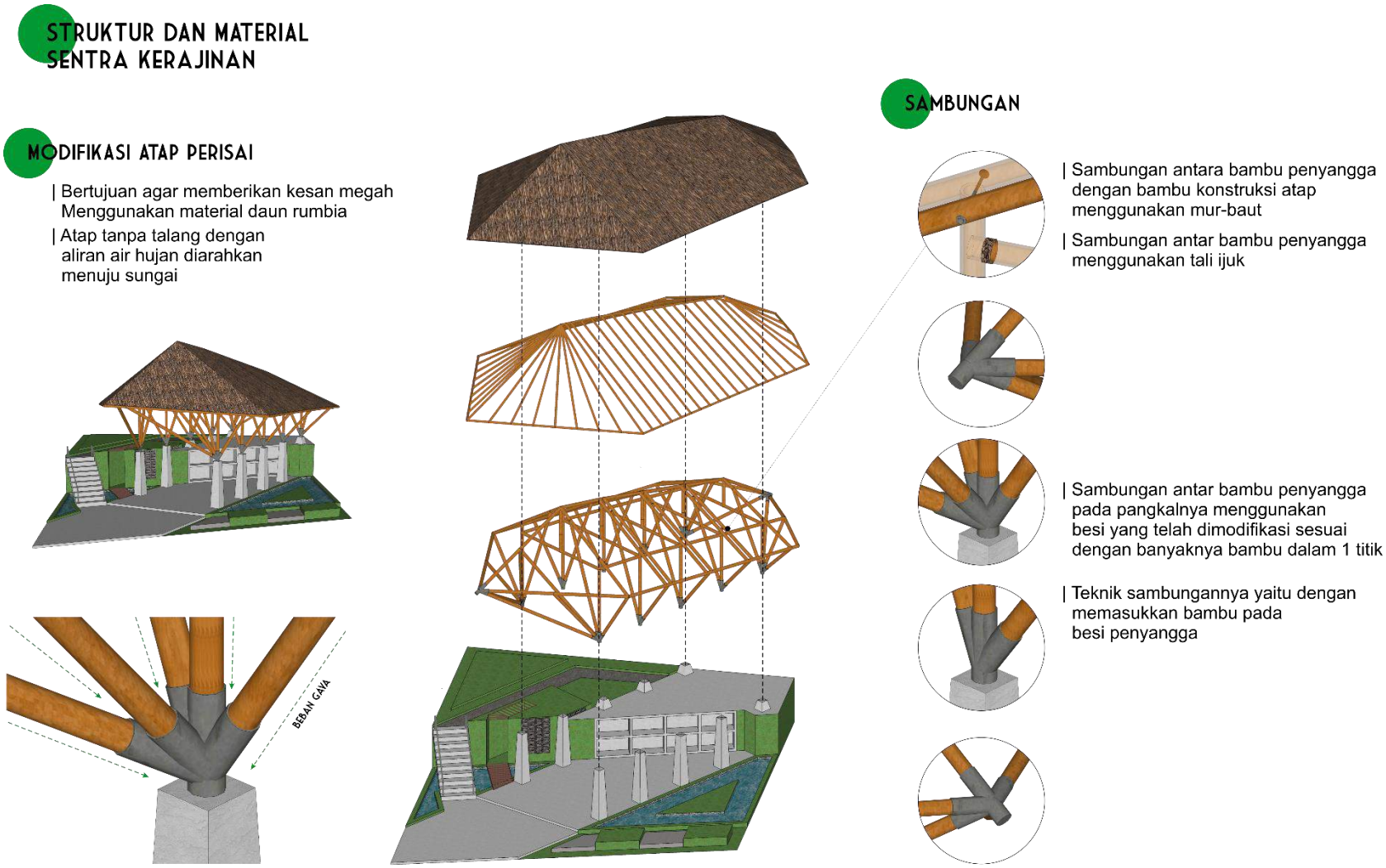

Gambar 5.26 Struktur dan Material Sentra Kerajinan (Hasil Analisa, 2018)

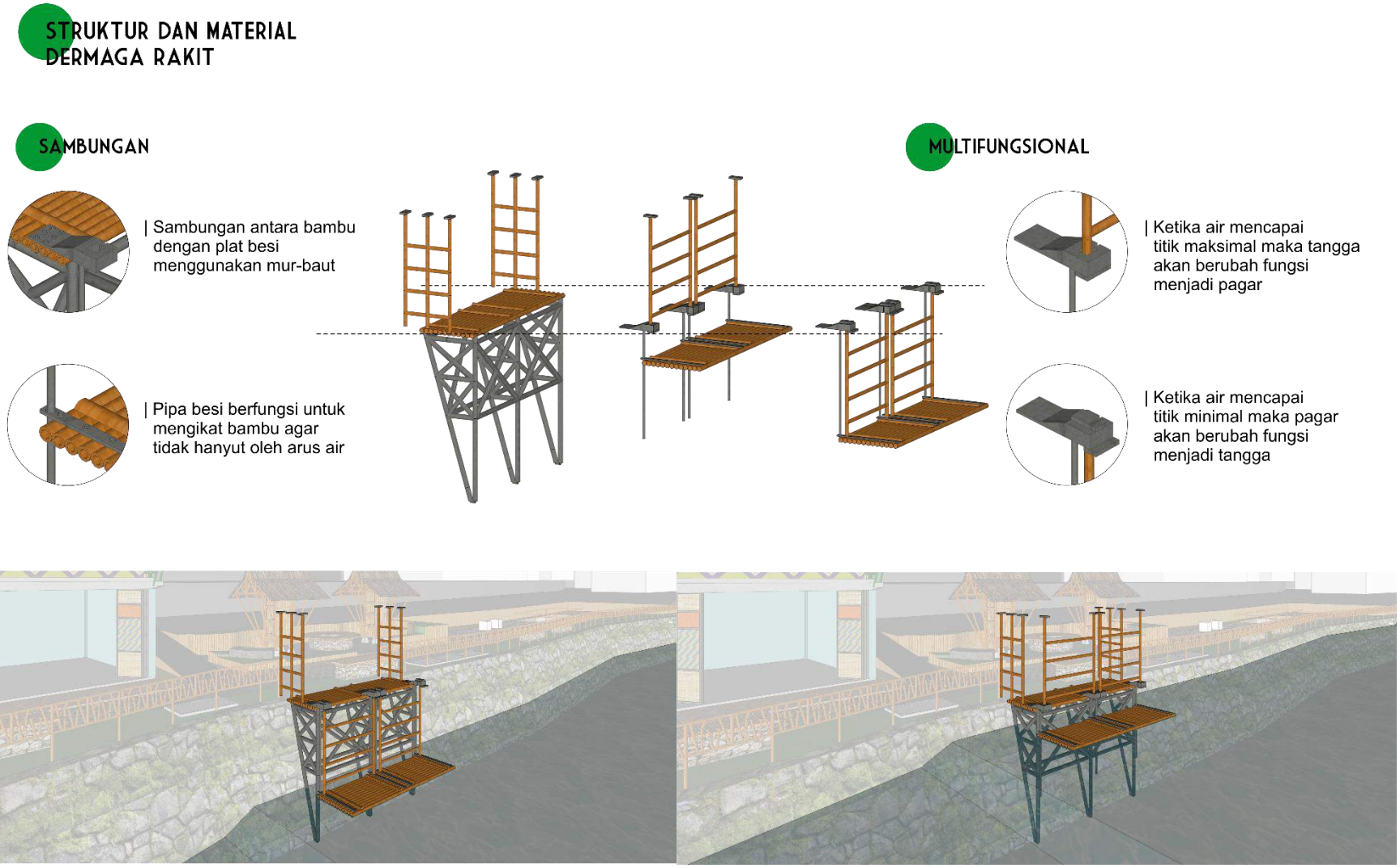

Gambar 5.27 Struktur dan Material Dermaga Rakit (Hasil Analisa, 2018)

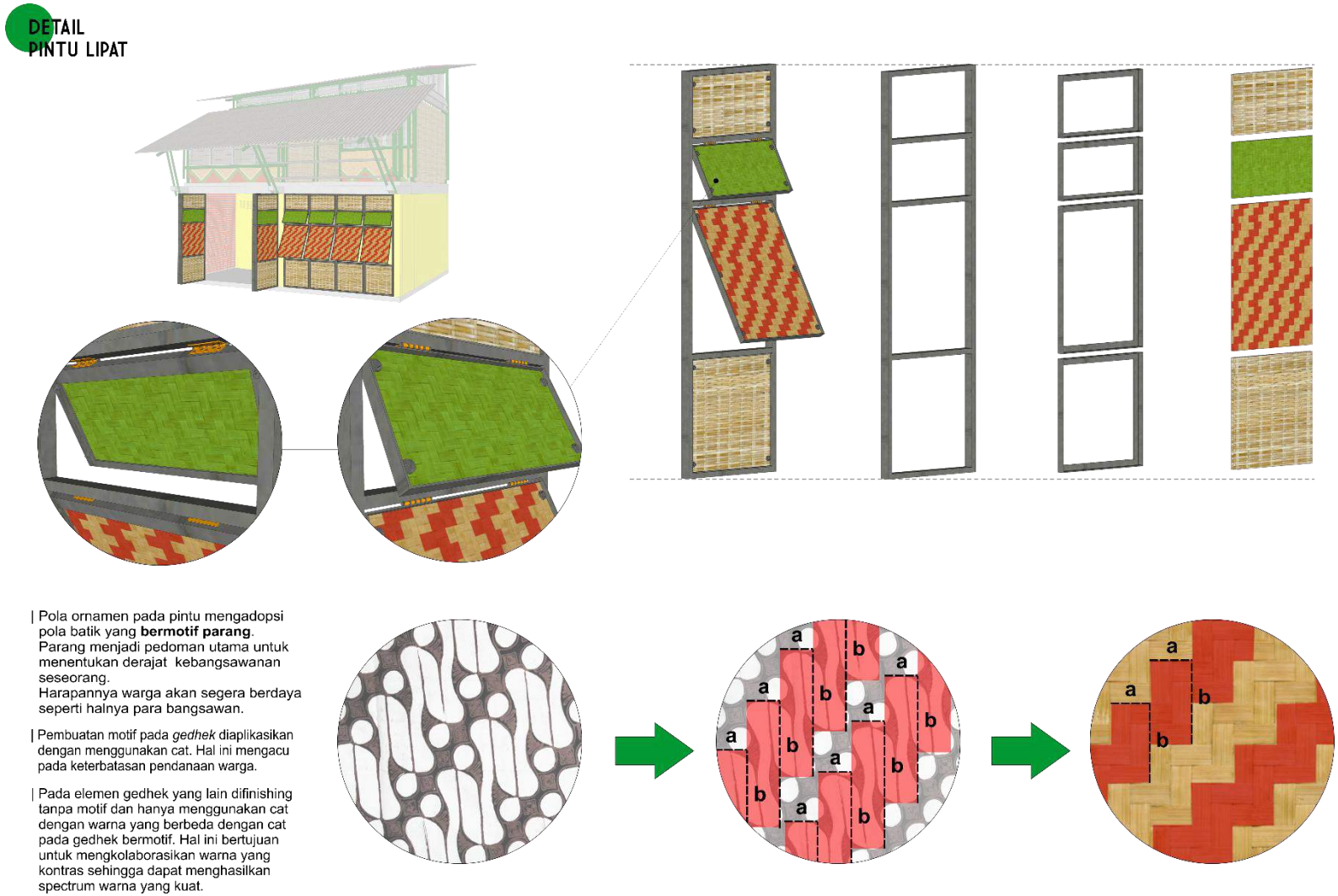

Gambar 5.28 Detail Pintu Lipat (Hasil Analisa, 2018)

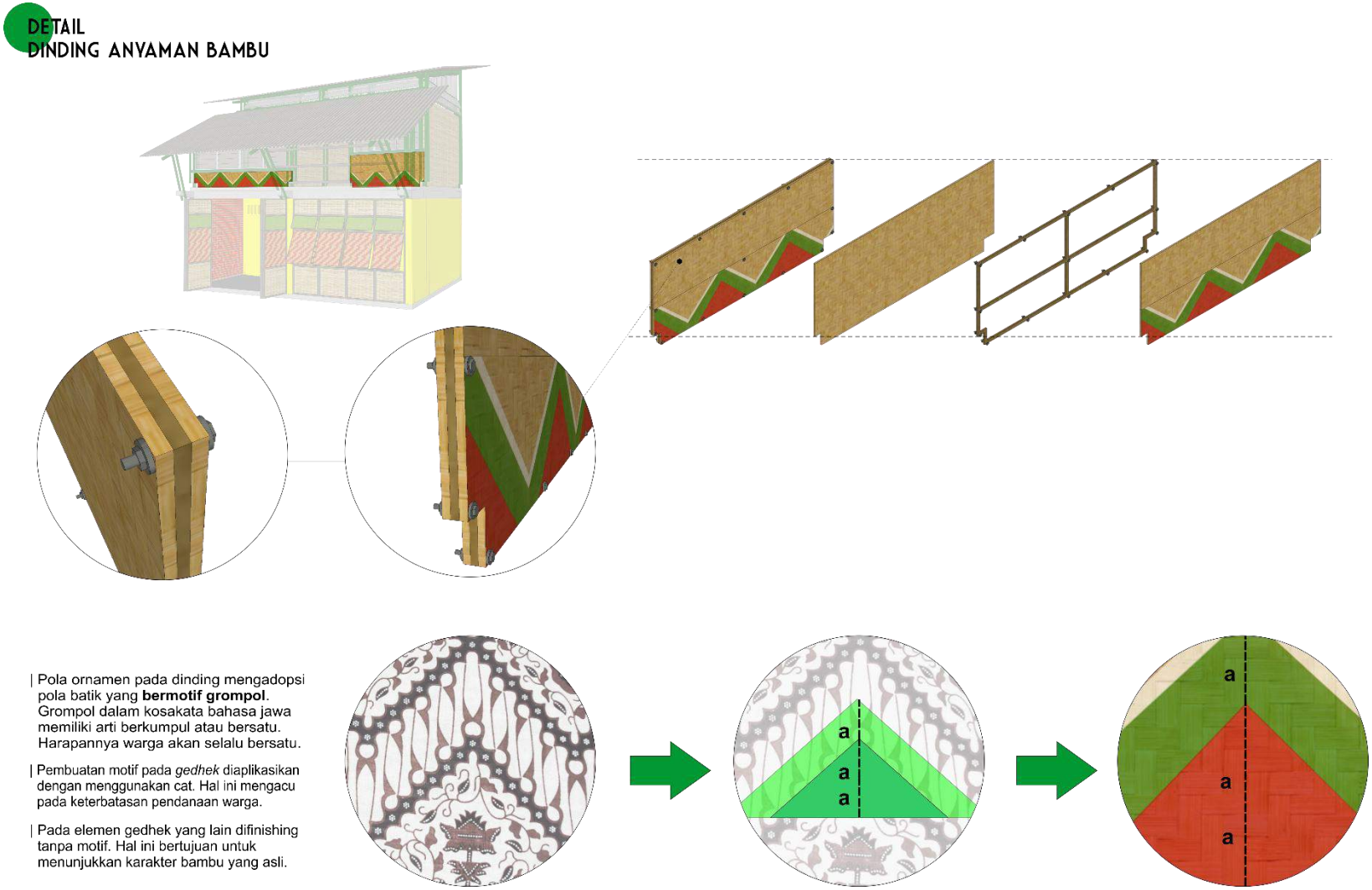

Gambar 5.29 Detail Dinding Anyaman Bambu (Hasil Analisa, 2018)

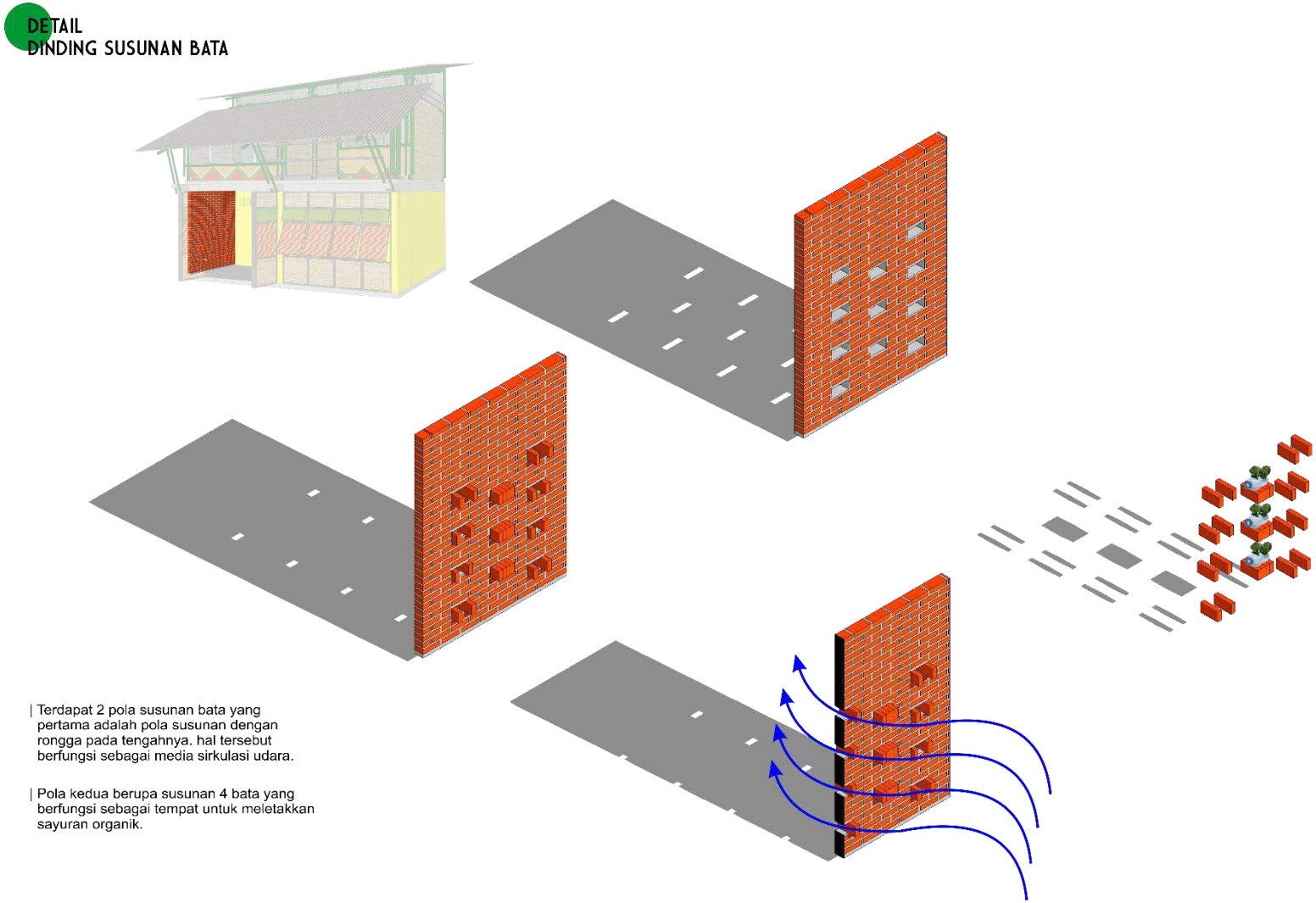

Gambar 5.30 Detail Dinding Susunan Bata (Hasil Analisa, 2018)

Gambar 5.31 Layout Utilitas (Hasil Analisa, 2018)

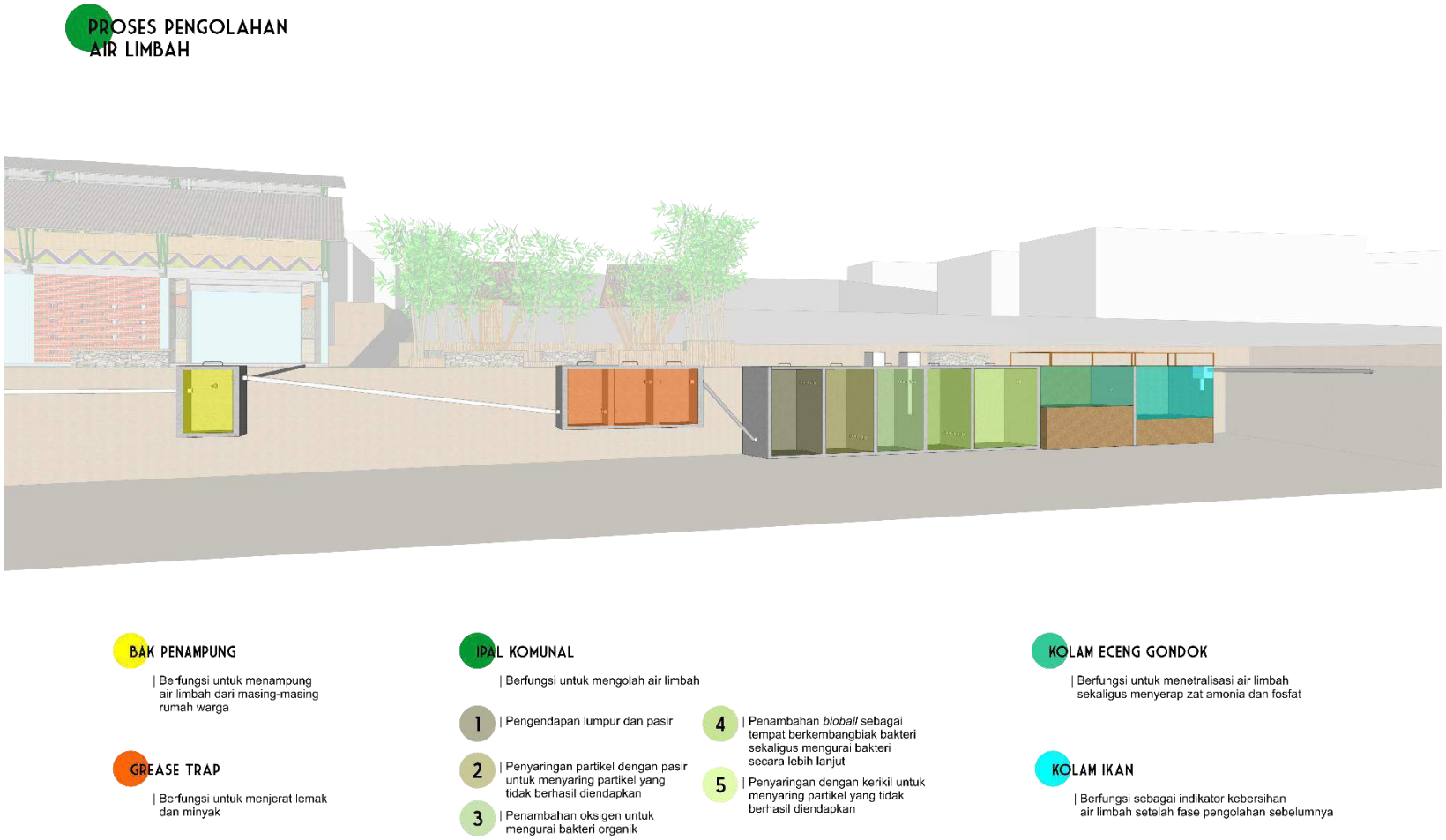

Gambar 5.32 Proses Pengolahan Air Limbah (Hasil Analisa, 2018)

BAB 6
KESIMPULAN

Kekumuhan dan buruknya interaksi sosial menjadi permasalahan utama dalam kasus desain ini. Beberapa cara yang coba ditawarkan untuk mengatasi masalah kekumuhan antara lain yaitu:

1. Mengembalikan garis sempadan sungai sebesar 3 m dengan 2 m berfungsi sebagai jalan inspeksi dan 1 meter sebagai jalur hijau.
2. Mendesain hunian sesuai dengan kriteria terkepras yang sebelumnya telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat.

Sedangkan beberapa cara yang coba ditawarkan untuk mengatasi masalah buruknya interaksi sosial antara lain yaitu:

1. Mengusung konsep HBE (*Home Based Enterprise*)
2. Memfungsikan sungai sebagai sarana rekreasi
3. Memanfaatkan area perkampungan sebagai wisata edukasi kampung
4. Memanfaatkan jalan kampung sebagai area *urban farming*
5. Mengolah sampah menjadi sesuatu yang produktif dan bernilai

Dengan banyaknya kegiatan yang warga lakukan bersama-sama dan diiringi juga dengan tujuan bersama yang kuat maka diharapkan interaksi sosial antar warga menjadi semakin membaik.

(halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Desa Caturtunggal (2015) Perdes No: 04/Perdes/2015 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal, Pemerintah Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman

Nasdian, FredianTonny, (2014), *Pengembangan Masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Sleman (2012), Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman

Cohen Bruce J, (2009), *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2008) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Elly M. Setiadi, (2007), Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Midgley, James, (2005), *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, Ditperta Islam, Jakarta.

Ng. Philipus dan Nurul Aini, (2004), *Sosiologi dan Politik*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Ginsberg, Morris. (2003), *Keadilan dalam Masyarakat*, Penerbit: Pondok Edukasi,
Bantul.

Slamet, (2003), *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Keith, Davis, New Strom, John W, (2000), *Perilaku dalam Organisasi Jilid 1*, Erlangga, Jakarta.

Kementerian Kesehatan (1999), Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 829 Menkes SK/VII/1999 Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan, Kementerian Kesehatan, Provinsi D.K.I Jakarta

Mikkelsen, Britha, (1999), *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan* (Penerjemah: Matheos Nalle), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Macionis, J. J, (1997), *Sociology: Sixth edition*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Macionis, John J., dan Henry Borne, (1996), *Sociology: A Global Introduction*, Hertfordshire, U.K. Prentice Hall.

Rogers, Everett M, (1995), *Diffusions of Innovations, Forth Edition*, Tree Press, New York.

Todaro, Michael. P, (1989), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, PT Erlangga (Terjemahan), Jakarta.

G. Goble, Frank. (1987), A. Supratiknya, ed. *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta.

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Doxiadis. Constantinos A, (1968), *Ekistics; an Introduction to The Science of Human Settlements*, Oxford University Press, New York.

Murray, Hendry A, (1938), *Explorations in Personality*, Oxford University Press, New York.

(halaman ini sengaja dikosongkan)

LAMPIRAN 1:

Keputusan Bupati Sleman Nomor 83/Kep.KDH/A/2014 tentang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

(halaman ini sengaja dikosongkan)

BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 83 /Kep.KDH/A/2014

TENTANG

KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

BUPATI SLEMAN,

Menimbang :

a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak, dan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh perkotaan merupakan tangggung jawab pemerintah daerah;

b. bahwa penetapan kawasan permukiman kumuh perkotaan dimaksudkan sebagai dasar lokasi prioritas penanganan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Nasional Strategi Pengembangan (KNSP) Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan sebanyak 45 (empat puluh lima) lokasi, di 6 (enam) kecamatan, dengan luas keseluruhan sebesar 41,4 Ha (empat puluh satu koma empat hektar) dengan daftar lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tergambar dalam peta sebaran Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.1 sampai dengan Lampiran II.45 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi lokasi prioritas penanganan secara terintegrasi dan terpadu antara sektor perumahan dan sektor permukiman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 Desember 2014

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman.
3. Kepala Dinas DPUP Kabupaten Sleman.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 83 /Kep.KDH/A/2014
TANGGAL : 5 Desember 2014

DAFTAR LOKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

NO	LOKASI (PADUKUHAN)	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF				KOORDINAT		KEKUMUHAN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS	NOMO LAMPI PET
			RT	RW	DESA	KECAMATAN	LINTANG (LS)	BUJUR (BT)	NILAI	TINGKATAN			
1	Dabag	1,66	05	28	Condongcatur	Depok	7° 46' 16,71"	110° 24' 0,34"	244	Sedang	Tanah milik masyarakat	Tinggi	II.1
2	Gorongan	0,81	01	33	Condongcatur	Depok	7° 45" 40,17"	110° 24' 1,45"	188	Ringan	Tanah milik masyarakat	Sedang	II.2
3	Kentungan	0,18	09	51	Condongcatur	Depok	7° 44' 49,04"	110° 23' 28,87"	246	Sedang	Tanah kas desa	Sedang	II.3
4	Ngropoh	0,52	04	24	Condongcatur	Depok	7° 45' 48,41"	110° 24' 14,19"	228	Ringan	Tanah milik masyarakat	Sedang	II.4
5	Ngropoh	1,73	02	23	Condongcatur	Depok	7° 45' 43,83"	110° 24' 4,72"	280	Sedang	Tanah milik masyarakat	Tinggi	II.5
6	Soropadan	1,78	06	38	Condongcatur	Depok	7° 45' 54"	110° 23' 28"	193	Ringan	Tanah milik masyarakat	Sedang	II.6
7	Soropadan	2,96	05	35	Condongcatur	Depok	7° 45' 57"	110° 23' 52"	256	Sedang	Tanah milik masyarakat	Tinggi	II.7
8	Soropadan	1,05	03	36	Condongcatur	Depok	7° 45' 40,57"	110° 23' 42,57"	278	Sedang	Tanah milik masyarakat	Sedang	II.8
9	Blimbingsari	0,84	05	16	Caturtunggal	Depok	7° 46' 27,45"	110° 22' 10,98"	254	Sedang	Tanah kas desa	Tinggi	II.9
10	Gowok	0,64	07	03	Caturtunggal	Depok	7° 47' 16,39"	110° 23' 57,59"	248	Sedang	Tanah kas desa	Sedang	II.10
11	Janti	0,25	05	03	Caturtunggal	Depok	7° 47' 13,61"	110° 24' 35,21"	256	Sedang	Tanah kas desa	Sedang	II.11
12	Karangmalang	1,31	01	16	Caturtunggal	Depok	7° 46' 17,19"	110° 23' 3,17"	236	Sedang	Tanah milik masyarakat	Tinggi	II.12
13	Mrican	1,12	24	08	Caturtunggal	Depok	7° 47' 9,72"	110° 24' 18,32"	238	Sedang	Tanah kas desa	Sedang	II.13
14	Nologaten	0,23	01	04	Caturtunggal	Depok	7° 46 31,6"	110° 23' 55,16"	306	Sedang	Tanah kas desa	Tinggi	II.14

NO	LOKASI (PADUKUHAN)	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF				KOORDINAT		KEKUMUHAN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS	NOMOR LAMPIRAN PETA
			RT	RW	DESA	KECAMATAN	LINTANG (LS)	BUJUR (LT)	NILAI	TINGKATAN			
15	Papringan	0,24	01	01	Caturtunggal	Depok	7° 47' 17,71"	110° 23' 46,79"	286	Sedang	Tanah kas desa	Sedang	II.15
16	Papringan	0,18	07	02	Caturtunggal	Depok	7° 46' 54,98"	110° 23' 49,98"	222	Ringan	Tanah kas desa	Sedang	II.16
17	Papringan	0,89	28	06	Caturtunggal	Depok	7° 46' 38,69"	110° 23' 55,44"	238	Sedang	Tanah kas desa	Sedang	II.17
18	Santren	0,13	12	04	Caturtunggal	Depok	7° 45' 42,88"	110° 23' 35,32"	284	Sedang	Tanah kas desa	Tinggi	II.18
19	Banaran	1,15	01	13	Sendangadi	Mlati	7° 43' 21,90"	110° 21' 56,07"	278	Sedang	Tanah milik masyarakat	Tinggi	II.19
20	Jatirejo	2,68	02	21	Sendangadi	Mlati	7° 44' 7,53"	110° 22' 12"	270	Sedang	Tanah milik masyarakat	Sedang	II.20
21	Kutu Dukuh	1,01	10	29	Sinduadi	Mlati	7° 45' 46,12"	110° 21' 57,86"	252	Sedang	Tanah kas desa	Tinggi	II.21
22	Rajek Lor	0,49	03	25	Tirtoadi	Mlati	7° 45' 5,02"	110° 19' 53,13"	344	Sedang	Tanah milik masyarakat	Tinggi	II.22
23	Rajek Wetan	0,63	04	28	Tirtoadi	Mlati	7° 45' 2,53"	110° 19' 56,48"	328	Sedang	Tanah milik masyarakat	Tinggi	II.23
24	Sanggrahan	0,58	05	14	Tirtoadi	Mlati	7° 44' 34,16"	110° 19' 4,92"	298	Sedang	Tanah milik masyarakat	Sedang	II.24
25	Karanglo	2,90	05-06	24	Tlogoadi	Mlati	7° 44' 20,09"	110° 20' 39,82"	292	Sedang	Tanah milik masyarakat	Sedang	II.25
26	Gamping Kidul	0,46	01	16	Ambarketawang	Gamping	7° 48' 3,96"	110° 19' 27"	286	Sedang	Tanah milik masyarakat	Sedang	II.26
27	Mejingwetan	0,45	08	07	Ambarketawang	Gamping	7° 47' 18"	110° 19' 29,15"	288	Sedang	Tanah milik masyarakat	Sedang	II.27
28	Patukan	0,85	08-09	22	Ambarketawang	Gamping	7° 47' 47,03"	110° 19' 29,54"	264	Sedang	Tanah milik masyarakat	Tinggi	II.28
29	Banyumeneng	0,89	15	04	Banyuraden	Gamping	7° 47' 18,47"	110° 20' 38,77"	256	Sedang	Tanah milik masyarakat	Tinggi	II.29
30	Somodaran	0,64	01	10	Banyuraden	Gamping	7° 47 39,02"	110° 19' 52,72"	284	Sedang	Tanah milik masyarakat	Rendah	II.30
31	Cambahan	0,49	08	31	Nogotirto	Gamping	7° 45' 37,86"	110° 19' 48,37"	262	Sedang	Tanah milik masyarakat	Sedang	II.31
32	Trini	0,30	02	16	Trihanggo	Gamping	7° 44' 57,43"	110° 21' 7,05"	252	Sedang	Tanah milik masyarakat	Sedang	II.32

(halaman ini sengaja dikosongkan)

LAMPIRAN 2:

Surat Penagihan Sewa Tanah Kas Desa untuk Permukiman

(halaman ini sengaja dikosongkan)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KECAMATAN DEPOK

PEMERINTAH DESA CATURTUNGGAL

Jl. Kaswari No. 2 Demangan Baru, Caturtunggal Depok Sleman Telp. (0274) 514826

Nomor : 660/ 120

Hal : Penagihan Sewa

Tanah Kas Desa untuk Pemukiman

Kepada Yth :

Bapak/ Ibu/ Saudara : Suyadi

Pringgodani Jl. Koconegara No. 8 RT 23/ 08

Desa Caturtunggal

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Desa Caturtunggal tentang Perdes No : 04/ Perdes/ 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal dan Perdes No : 04/ Perdes/ 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2017, maka demi kelancaran jalannya roda Pemerintahan Desa Caturtunggal, Saudara sebagai penyewa Tanah Kas Desa agar memenuhi kewajiban membayar sewa Tanah Kas Desa di Kantor Desa Caturtunggal.

Induk : 200 , Persil : 88 , Klas : P.III , Luas : 232 m2. di Padukuhan Mrican

Jumlah Tagihan **Rp. 1.160.000,oo**

Paling lambat **31 Oktober 2017.**

Demikian surat ini disampaikan, atras perhatian dan pemenuhan kewajibannya diucapkan terimakasih.

Caturtunggal, 10 APR 2017

Kepala Desa

Agus Santoso, S.Psi

Perincian tagihan sbb :

-	Tahun 2016	s/d 2017	: Rp.	1.160.000,oo
-	Tahun	s/d	: Rp.	
-	Tahun	s/d	: Rp.	
-	Tahun	s/d	: Rp.	
-	Tahun	s/d	: Rp.	
				+
Jumlah keseluruhan :			Rp.	1.160.000,oo

NB : Apabila Sudah Melakukan Pembayaran / Melunasi Tagihan, agar MENGABAIKAN Surat Tagihan ini.